



BADAN POM

**BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU**



RENCANA STRATEGIS

2025–2029

Jl. Diponegoro No.10 Pekanbaru
Telepon: (0761) 21496 | Fax: (0761) 28755
Web: www.pom.go.id
Email: balaipom_pku@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU**

NOMOR HK.02.02.4A.12.25.115 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU TAHUN 2025 – 2029**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PEKANBARU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI PEKANBARU TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di

Pekanbaru untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Balai Besar POM di Pekanbaru dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Pekanbaru

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal : 05 Desember 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Pekanbaru,



ALEX SANDER

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya BPOM mengemban fungsi strategis dalam system kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Adapun struktur organisasi BBPOM di Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru



BBPOM di Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Selain pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM dan seluruh Unit Pelaksana Teknis salah satunya BBPOM di Pekanbaru diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Balai Besar POM di Pekanbaru berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyusunan Renstra 2025–2029 dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Setiap program dan kegiatan diarahkan agar menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan, baik dalam pelayanan pengawasan obat dan makanan maupun dalam pengelolaan internal kelembagaan.

Implementasi PUG dilakukan melalui pemanfaatan data terpilah, analisis gender (GAP), serta penyusunan Gender Budget Statement (GBS), guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat responsif gender dan mendukung pelayanan publik yang adil dan setara. Implementasi PUG dilakukan melalui:

- 1) Penerapan Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP)

Untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan dalam layanan pengawasan obat dan makanan serta dalam penguatan kelembagaan.

2) Penggunaan Data Terpilah:

Program dan kegiatan disusun berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan tidak diskriminatif.

3) Penyusunan Gender Budget Statement (GBS):

Sebagai bentuk komitmen anggaran yang mendukung pelaksanaan program responsif gender dalam berbagai kegiatan, termasuk edukasi publik, pengawasan sarana distribusi, dan pelibatan masyarakat.

4) Penguatan Kelembagaan PUG di Internal BBPOM:

Dilakukan melalui penunjukan focal point PUG, pelatihan SDM, serta kolaborasi lintas unit kerja agar pelaksanaan PUG lebih terintegrasi.

Melalui integrasi PUG ini, Balai Besar POM di Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan gender, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

BBPOM di Pekanbaru memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Provinsi Riau. Wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Riau yang terdiri atas enam kabupaten/kota, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BBPOM di Pekanbaru menghadapi berbagai tantangan, antara lain luasnya cakupan wilayah pengawasan, masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta tingginya potensi peredaran produk ilegal, palsu, dan tidak memenuhi ketentuan. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya jalur distribusi produk, baik melalui saluran konvensional maupun platform digital (perdagangan elektronik).

Untuk menjawab tantangan tersebut, BBPOM di Pekanbaru berkomitmen untuk memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui optimalisasi sumber daya, peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sinergi lintas sektor. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, menekan peredaran produk yang berisiko terhadap kesehatan, dan memastikan masyarakat memperoleh obat dan makanan yang aman, berkhasiat, serta bermutu.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru periode 2025–2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra ini dirancang tidak hanya untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi dinamika dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan dalam industri obat dan makanan.

Pendekatan strategis tersebut memungkinkan BBPOM di Pekanbaru untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seiring dengan pesatnya inovasi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola distribusi produk di sektor obat dan makanan.

Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2025–2029 menandai langkah maju lembaga dalam upaya berkelanjutan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana, terarah, dan adaptif, BBPOM di Pekanbaru bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan profesionalisme dan keunggulan, serta memastikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, memperoleh akses terhadap obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Selama periode tahun 2020–2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru telah memperoleh berbagai penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja, dedikasi, dan komitmen dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Adapun penghargaan yang diterima BBPOM di Pekanbaru pada periode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 terbaik pertama Kementrian Negara/Lembaga dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 dari Kanwil DJPB Riau (kategori K/L Pengelola dana DIPA non belanja pegawai lebih dari 10 milyar rupiah sampai dengan 100 milya rupiah).
2. Pada tahun 2020 terbaik pertama Kementrian Negara/Lembaga dengan Nilai Kinerja Pengelolaan Kontrak dari Kanwil DJPB Riau
3. Pada tahun 2020 terbaik ketiga Kementrian Negara/Lembaga dengan Nilai Kinerja Penggunaan Akun Covid-19 dari Kanwil DJPB Riau
4. Pada tahun 2020 salah seorang pegawai BBPOM di Pekanbaru Saudara Safrizal menjadi Duta Perbendaharaan KKPN Pekanbaru
5. Seluruh Uji Profisiensi (6 Uji) pada tahun 2020 memperoleh hasil memuaskan dari P3OMN

6. BBPOM di Pekanbaru sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2020 dengan Kategori Sangat Baik
7. BBPOM di Pekanbaru Peringkat Ketiga Unit Kerja dengan nilai SAKIP tertinggi tahun 2020 dari Badan POM
8. Pada tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru stand terfavorit pada ajang *the 3rd* Pekanbaru Bandaraya Malayu 2021
9. Pada tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru stand terfavorit kategori edukasi pada ajang Pekanbaru raya *fair* dan *Expo* 2021
10. Pada tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru Peringkat Kedua Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional
11. Pada tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru sebagai Nominator Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tingkat Nasional
12. Pada tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru terbaik 1 atas Partisipasi Aktif, Kerjasama dan Respon Data Terbaik dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan QMS ISO 9001:2015
13. Kader Binaan Balai Besar POM di Pekanbaru Meraih Juara 1 Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Terbaik Tingkat Nasional
14. BBPOM di Pekanbaru menerima penghargaan Dari Kapolda Riau Atas Peran Aktif Dalam Membantu Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Pada Dit Polairud Polda Riau.
15. Pada Tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru menerima penghargaan Peringkat ketiga Kementerian / Lembaga dengan Nilai IKPA Terbaik Pagu DIPA Non Belanja Pegawai Rp.10 M s.d Rp.100M
16. BBPOM di Pekanbaru menerima Penghargaan Dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Atas Dukungan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan
17. Penghargaan atas Partisipasi Aktif Balai Besar POM di Pekanbaru, memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan pada acara Festival Literasi Riau yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Pemerintah Provinsi Riau
18. Pada tahun 2022 BBPOM di Pekanbaru juara 1 stand terfavorit Pekanbaru raya *fair* dan *Expo* 2022 dari Disperindag Pekanbaru
19. Apresiasi diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Melalui Program Inovasi SIPETIR dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
20. Apresiasi diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kabupaten Rokan Hilir Melalui Program Inovasi SIPETIR dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

21. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Partisipasi Sebagai Pengisi Acara Dalam Kegiatan Pijar Bertuah dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
22. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Partisipasi Sebagai Peserta Dalam Kegiatan Bazar Kewirausahaan FAPERTA EXPO Tingkat Nasional dari Universitas Riau.
23. Penghormatan dan Apresiasi diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Kerjasama yang Baik Dalam Pengungkapan Produksi Kosmetik Illegal di Wilayah Pekanbaru dari Badan POM.
24. Apresiasi diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru atas partisipasi dalam Event Education Expo dengan Tema EDUCATION IS YOU di Pekanbaru.
25. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pelaksanaan 3 Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan (Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Sekolah) Serta Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
26. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pelaksanaan 3 Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan (Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Sekolah) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
27. Pada Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru memperoleh "Penghargaan Peringkat Pertama Peserta Pameran dalam Kegiatan Halal Bihalal"
28. Pada Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru memperoleh Peringkat Ketiga Nasional dalam Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023"
29. Apresiasi Kepada Agent Of Change (AoC) Balai Besar POM di Pekanbaru Atas Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kabupaten Bengkalis Melalui Program Inovasi SIPETIR
30. Apresiasi diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Desa Kuala Alam dan Desa Wonosari
31. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Desa Tanjung Kuras
32. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Desa Tumang dan Desa Buntan Besar
33. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kabupaten Siak Melalui Program Inovasi SIPETIR
34. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas "Atas Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Desa Bantan Tengah
35. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pembinaan dan Intervensi Program Desa Pangan Aman sehingga Desa Mekong Kabupaten

- Kepulauan Meranti terpilih sebagai Juara 3 Nasional Regional Barat Lomba Desa Pangan Aman
36. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas “Satuan Kerja Dengan Penyerapan Anggaran Tercepat dan Terbaik Pagu 10 Milliar s.d 50 Milliar Tahun Anggaran 2023
 37. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas “SATKER Terbaik Kedua Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Pagu 10 Milliar s.d 50 Milliar Tahun Anggaran 2023
 38. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru sebagai UPT Berkinerja Terbaik Ke-5 Tahun 2023
 39. Pada tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru Juara 3 Lomba Poster Dalam Rangka HUT BPOM Ke-23
 40. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Atas Pembinaan dan Intervensi Program Desa Pangan Aman sehingga Desa Bengkalis Kepulauan Meranti terpilih sebagai Juara 3 Nasional Regional Barat Lomba Desa Pangan Aman
 41. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik
 42. Tingkat Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Anggaran Kecil Dengan Jumlah Satker Lebih Dari 1 (Satu)
 43. Penghargaan diberikan kepada BBPOM di Pekanbaru Sebagai UPT Terbaik Kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan
 44. Penghargaan Kepada Tim Agen Perubahan BBPOM di Pekanbaru terbaik III sebagai agen tim agen perubahan Reformasi Birokrasi di tahun 2024

1.1.1 Capaian Kinerja BBPOM Di Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra pada tahun 2020-2024 nilai Kinerja BBPOM di Pekanbaru selama periode 2020-2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BBPOM di Pekanbaru selalu berupaya untuk terus meningkatkan capaian kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) BBPOM di Pekanbaru disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.2 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Pekanbaru 2020-2024



Tabel 1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020 – 2024

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	73,33	90,75	74,00	79,79	107,82	76,00	80,36	105,74	78,00	91,13	116,83	91,20	87,27	95,69
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	79,05	101,35	80,00	87,04	108,80	82,00	84,36	102,88	84,00	89,25	106,25	89,30	85,54	95,79
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	74,69	93,36	75,00	75,98	101,31	77,00	74,77	97,10	79,00	84,53	107,00	84,60	78,35	92,62
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	79,21	113,16	80,00	80,69	100,86	81,00	84,67	104,53	82,00	80,15	97,75	85,00	84,21	99,07
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	85,00	71,00	83,53	86,00	86,67	100,78	87,00	75,83	87,16	85,00	98,75	116,18
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	79,00	89,90	113,80	85,50	92,24	107,88	87,50	97,57	111,51	89,00	95,14	106,90	96,36	97,47	101,15
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50,00	63,77	127,54	59,00	66,17	112,15	62,00	76,67	123,66	65,00	72,29	111,21	74,48	83,73	112,41

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00	99,40	110,44	99,00	99,90	100,91	99,20	100,00	100,81	99,50	99,95	100,45	100,00	99,84	99,84
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	25,00	38,75	155,00	50,00	52,54	105,08	55,00	70,97	129,04	60,00	78,18	130,30	78,50	68,60	87,38
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48,00	58,86	122,63	60,00	76,63	127,72	63,00	75,84	120,38	66,00	75,10	113,79	75,47	65,84	87,24
		11	Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,10	116,81	4,20	4,46	106,19	4,40	4,11	93,41	4,25	4,25	100,00	4,50	4,54	100,89
		12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77,00	100,00	129,87	79,00	100,00	126,58	100,00	100,00	100,00
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	100,00	105,26

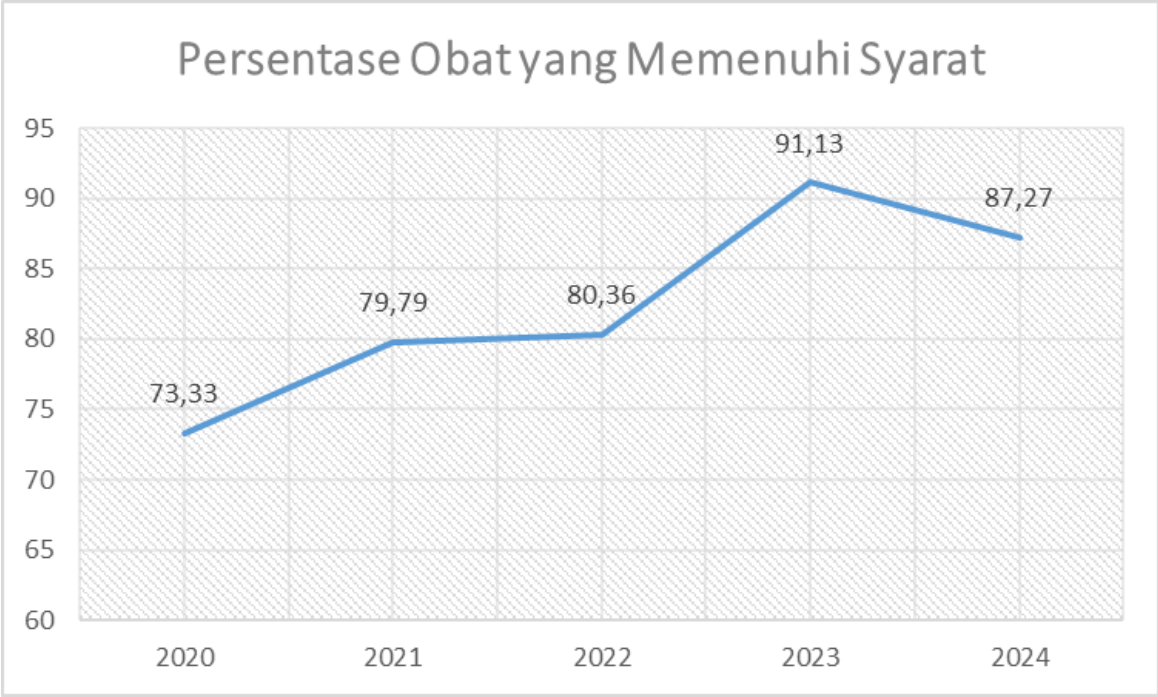
No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,85	93,10	107,20	93,00	93,70	100,75	94,40	95,67	101,35	95,80	96,43	100,66	97,30	97,67	100,38
		15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	16,00	100,00	40,00	40,00	100,00	65,00	65,00	100,00	90,00	90,00	100,00	115,00	115,00	100,00
		16	Jumlah desa pangan aman	4,00	4,00	100,00	12,00	12,00	100,00	18,00	18,00	100,00	25,00	25,00	100,00	31,00	31,00	100,00
		17	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2,00	2,00	100,00	4,00	4,00	100,00	6,00	6,00	100,00	8,00	8,00	100,00	10,00	10,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80,00	97,81	122,26	100,00	98,43	98,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80,00	94,37	117,96	100,00	97,32	97,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45,00	79,32	176,27	79,00	88,95	112,59	81,00	100,00	123,46	83,00	100,00	120,48	100,00	83,00	83,00

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,00	72,40	85,18	79,00	77,50	98,10	84,00	84,60	100,71	89,00	84,53	94,98	85,17	88,76	104,22
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,83	121,19	2,00	2,00	100,00	2,25	2,80	124,44	2,50	3,00	120,00	3,00	3,00	100,00
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73,00	75,78	103,81	78,00	78,13	100,17	80,00	77,15	96,44	83,00	84,02	101,23	85,00	86,33	101,56
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00	87,10	101,28	88,20	90,60	102,72	89,30	97,30	108,96	90,40	99,10	109,62	99,20	99,44	100,24
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,00	62,37	89,10	64,28	65,14	101,34	66,19	70,82	107,00	68,10	77,77	114,20	77,80	82,36	105,86
		26	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,50	92,00	102,79	92,50	92,89	100,42	93,00	96,84	104,13	93,50	97,44	104,21	98,00	99,45	101,48

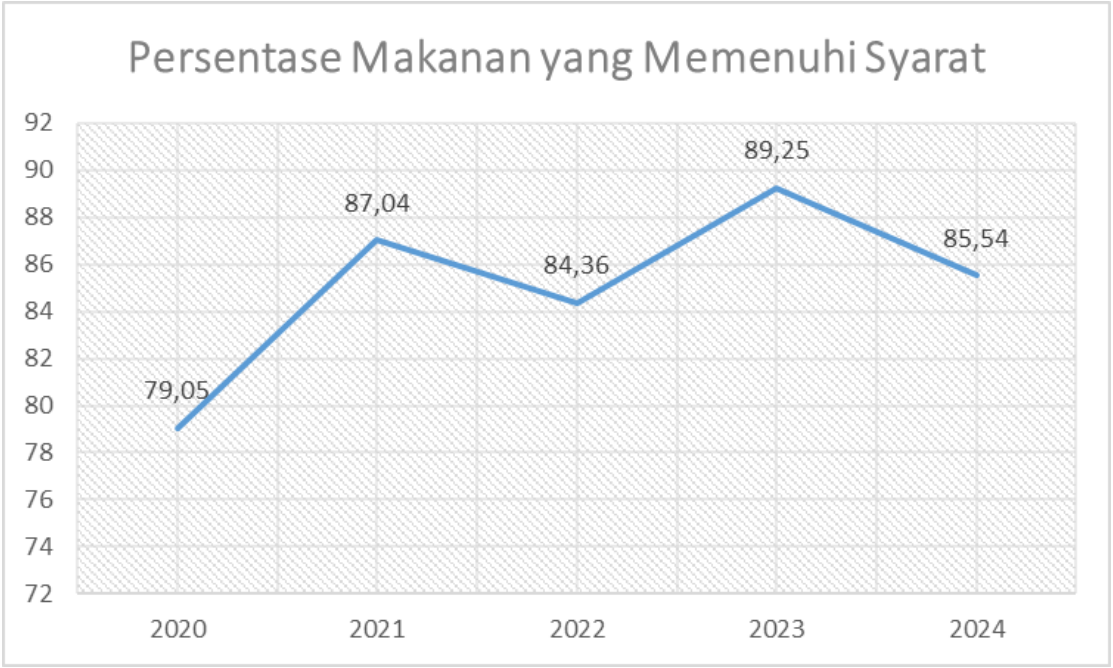
No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Indeks RB UPT	90,00	80,21	89,12	78,10	77,96	99,82	79,10	84,93	107,37	80,10	85,65	106,93	88,05	88,76	100,81
		28	Nilai AKIP UPT	81,00	81,02	100,02	83,50	80,63	96,56	86,00	81,42	94,67	88,50	83,44	94,28	84,66	83,47	98,59
		29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,17	96,83	100,69
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	77,78	103,71	78,00	82,95	106,35	79,00	83,73	105,99	80,00	89,71	112,14	90,81	86,13	94,85
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00	93,18	100,19	93,50	90,54	96,83	94,10	90,55	96,24	95,30	91,84	96,37	91,32	92,3	101,07
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,44	100	125,88
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	97	127,63
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	44,13	73,55
		35	Tingkat Efisiensi Pengguna Anggaran	88,00	100,00	113,64	92,00	100,00	108,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BBPOM di Pekanbaru memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Dari Tabel 1.1 di atas, merupakan capaian kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru dari tahun 2020 s.d 2024. Penjelasan terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

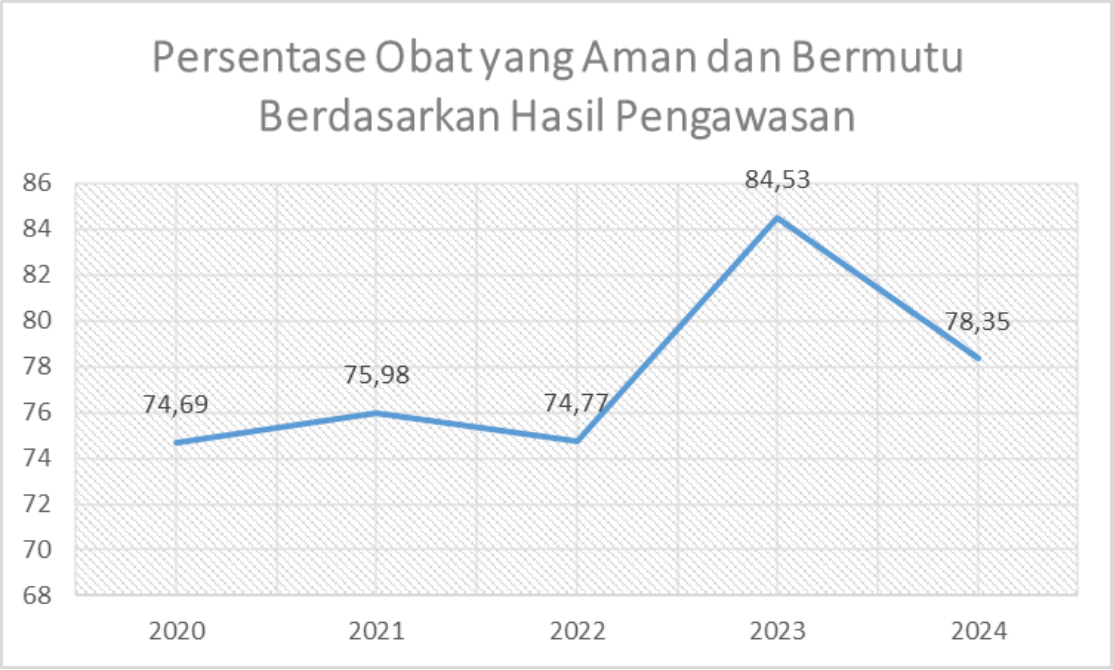
- 1) **Sasaran Kegiatan I:** Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT, diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Terdapat 3 indikator yang menunjukkan pertumbuhan kinerja dengan kategori **meningkat (on the track)**, yang menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, 2 indikator lainnya menunjukkan pertumbuhan kinerja dengan kategori **meningkat (moderat)**, yang berarti meskipun ada perkembangan yang positif, pencapaiannya masih perlu diperhatikan lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih optimal.



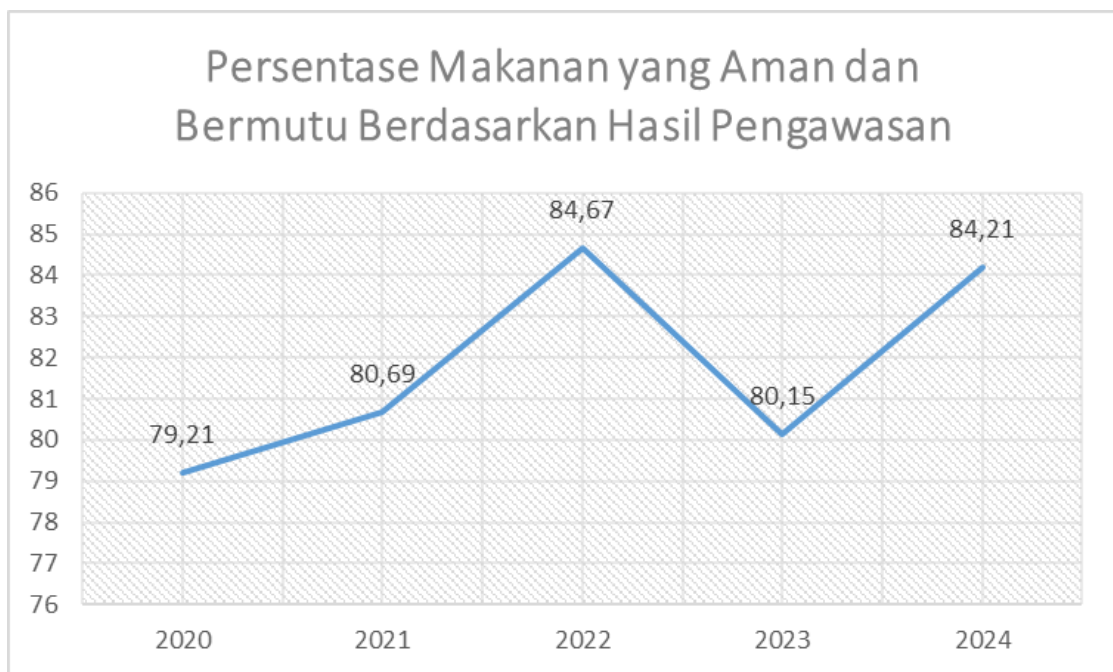
Gambar 1.3 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 2020-2024



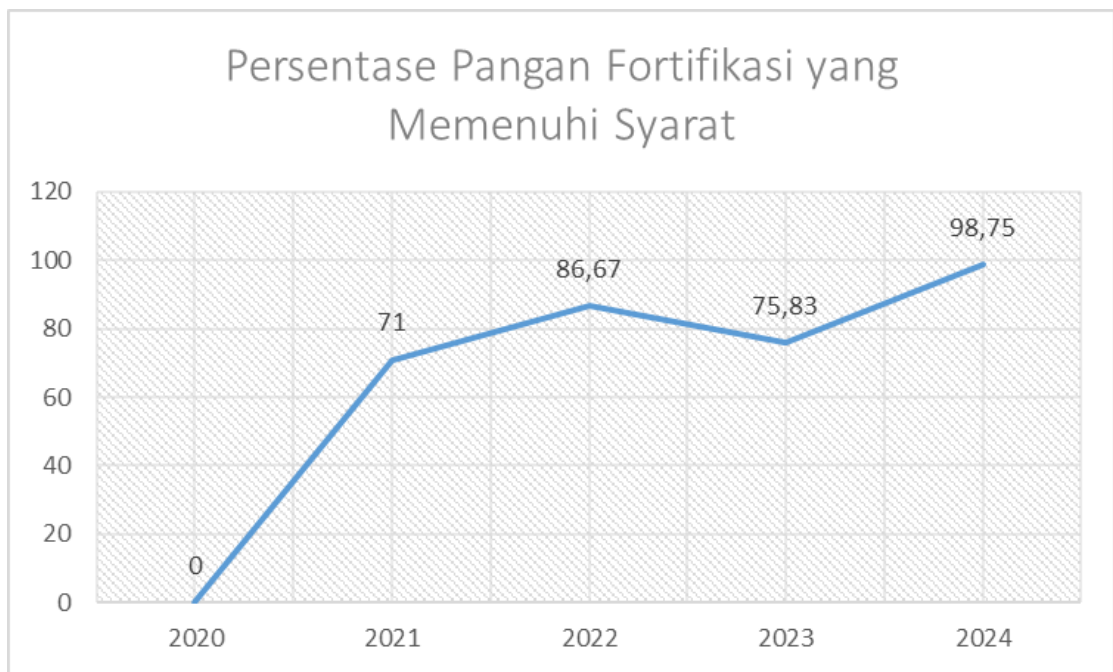
Gambar 1.4 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2020-2024



Gambar 1.5 Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 2020-2024



Gambar 1.6 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 2020-2024



Gambar 1.7 Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 2020-2024

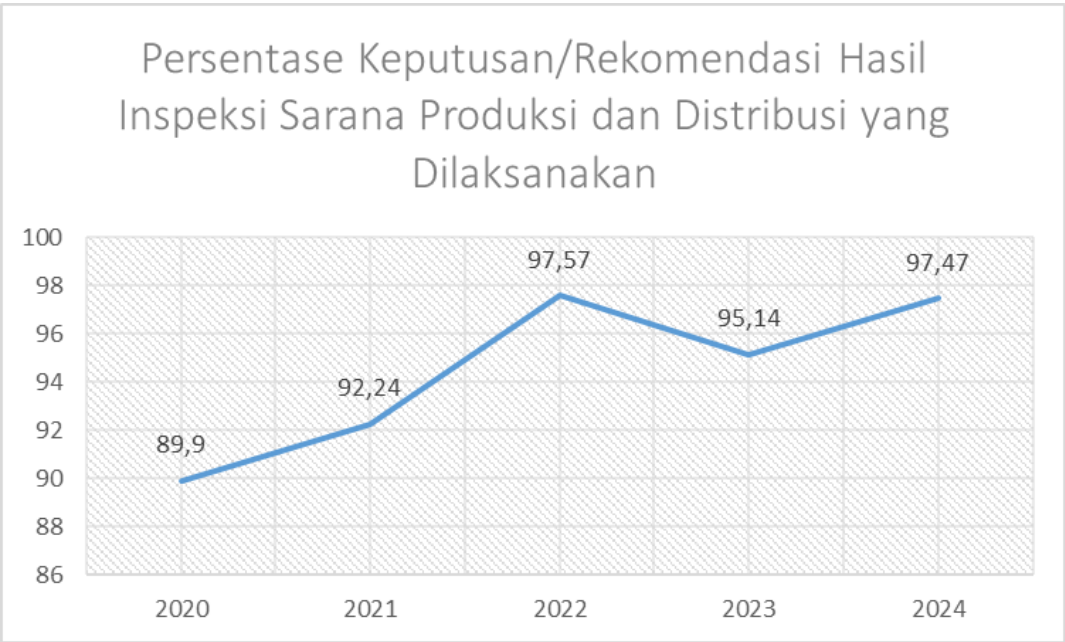
Hal ini menjadi perhatian BBPOM di Pekanbaru untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, upaya yang dilakukan adalah melalui:

- Perbaikan kerangka sampling (tidak hanya targeted namun juga dilakukan secara random) agar lebih representatif menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan di masyarakat.
- Perbaikan kriteria obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan

mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium.

- Survei profil produk beredar untuk mengetahui jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.

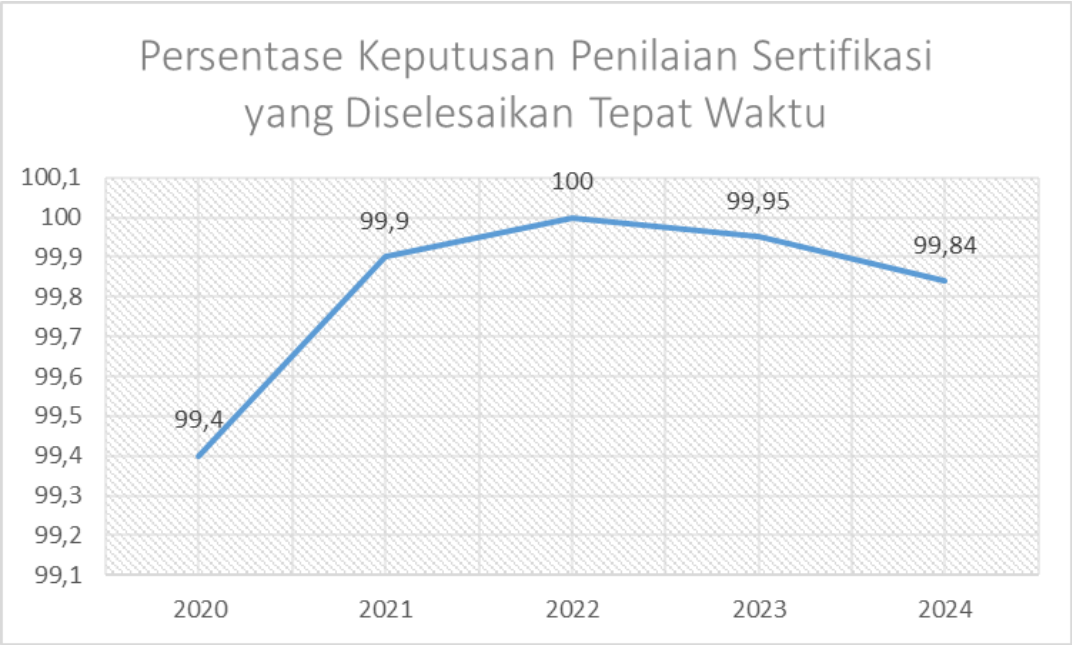
- 2) **Sasaran Kegiatan II:** Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT, diukur dengan 8 (delapan) indikator yaitu (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, (6) Indeks Pelayanan Publik, (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, (8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



Gambar 1.8 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 2020-2024



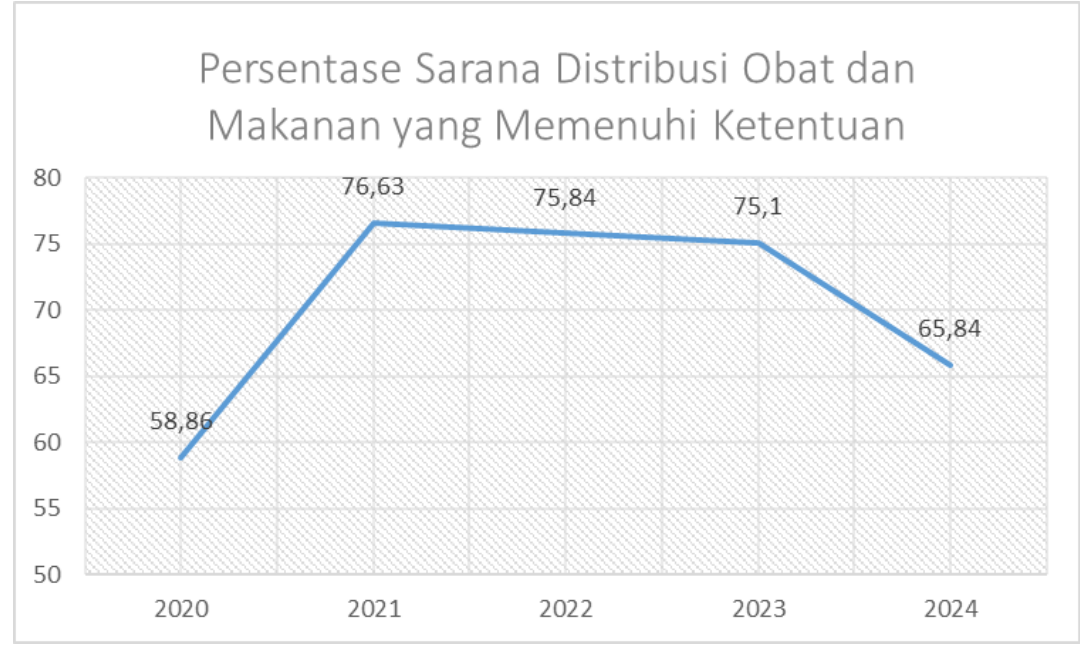
Gambar 1.9 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan 2020-2024



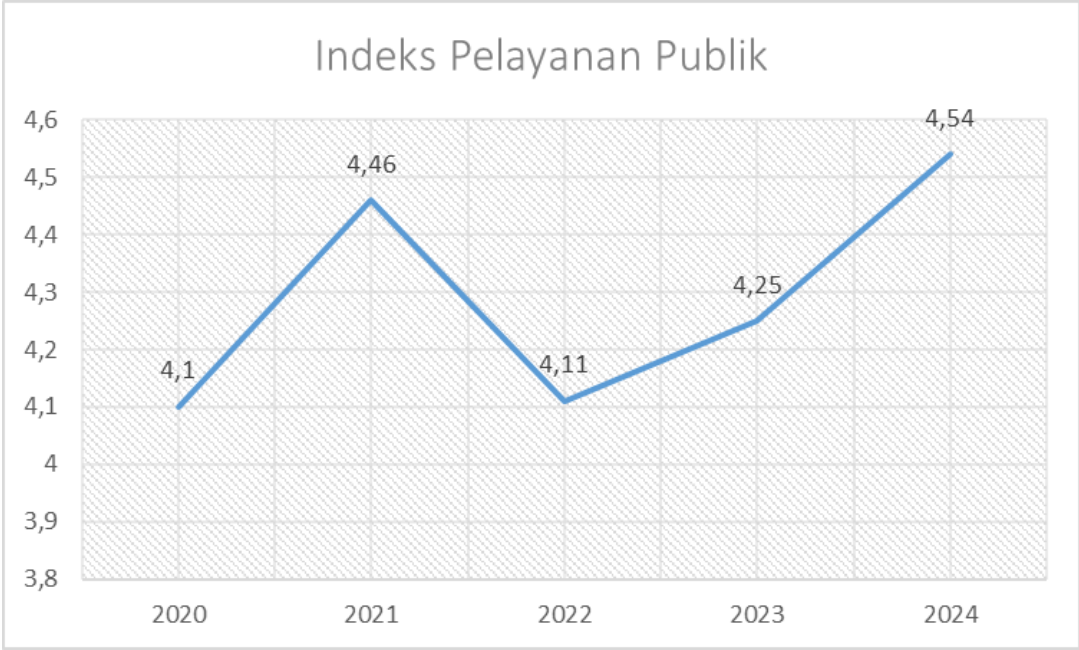
Gambar 1.10 Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu 2020-2024



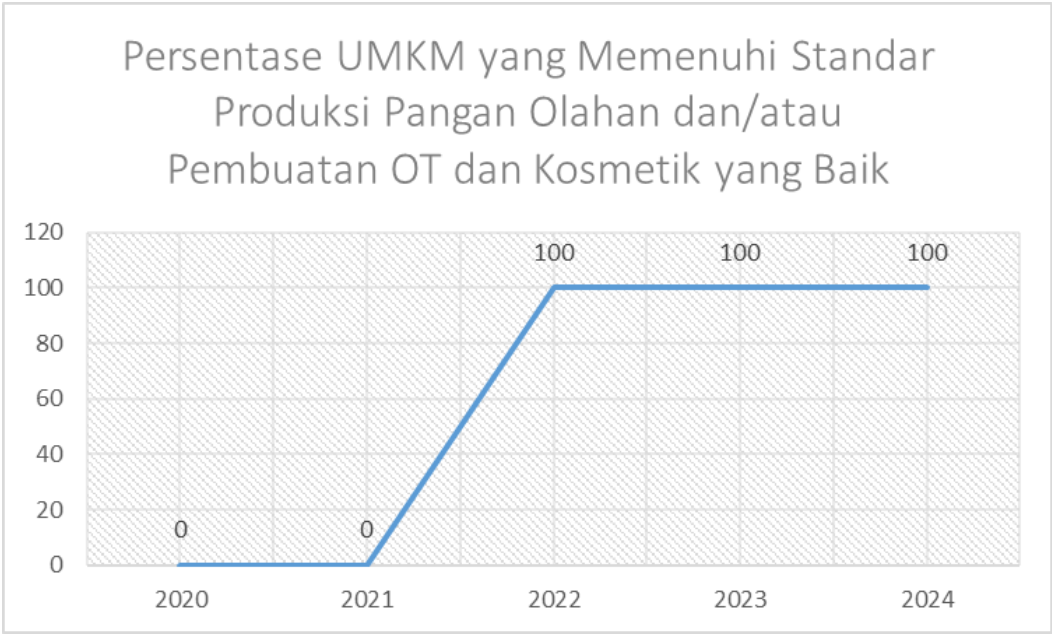
Gambar 1.11 Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 2020-2024



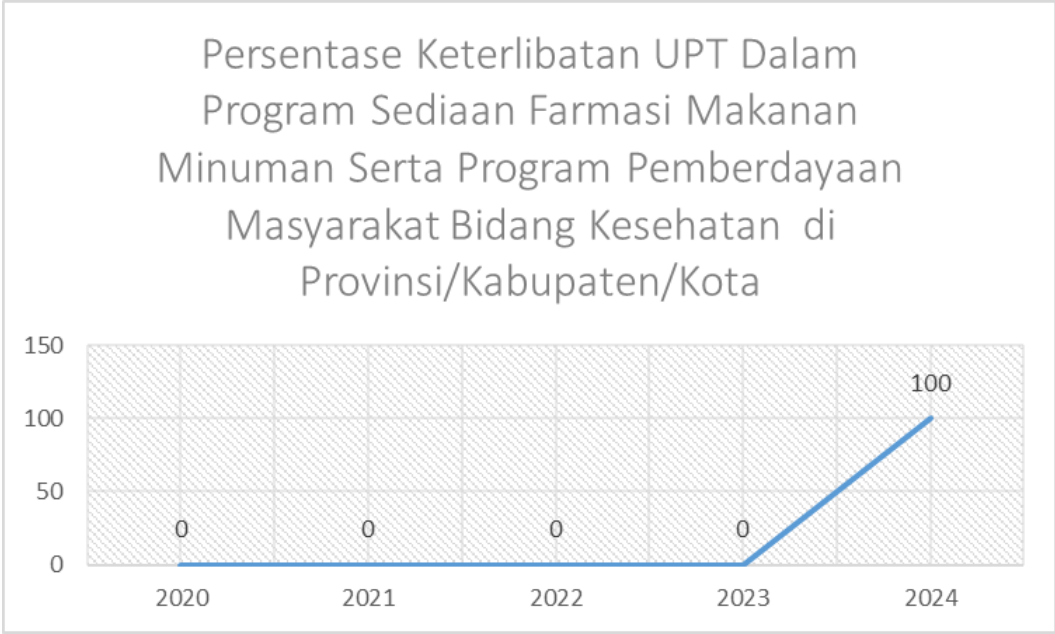
Gambar 1.12 Realisasi persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 2020-2024



Gambar 1.13 Realisasi Indeks Pelayanan Publik 2020-2024



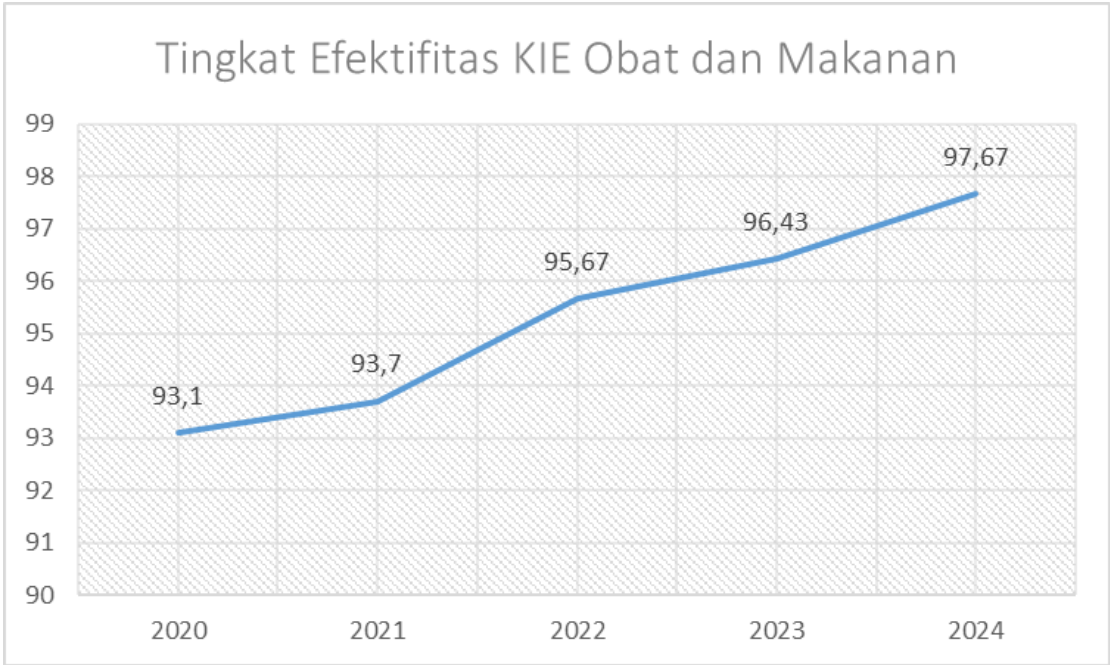
Gambar 1.14 Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 2020-2024



Gambar 1.15 Realisasi Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 2020-2024

Analisis tren untuk Sasaran Kegiatan ke-2 dihitung terhadap 1 indikator, yang menunjukkan **pertumbuhan kinerja meningkat (*on the track*)**. Hal ini mencerminkan bahwa indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan kemajuan yang stabil.

- 3) **Sasaran Kegiatan III:** Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT, diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu (1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, (3) Jumlah desa pangan aman, (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas KIE obat dan makanan diantaranya melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan KIE dikemas menjadi lebih kreatif dan efektif sehingga audiens yang terjaring lebih banyak, meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pemberian KIE seperti dengan pihak sekolah, dinas kesehatan dll..



Gambar 1.16 Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 2020-2024



Gambar 1.17 Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 2020-2024



Gambar 1.18 Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 2020-2024

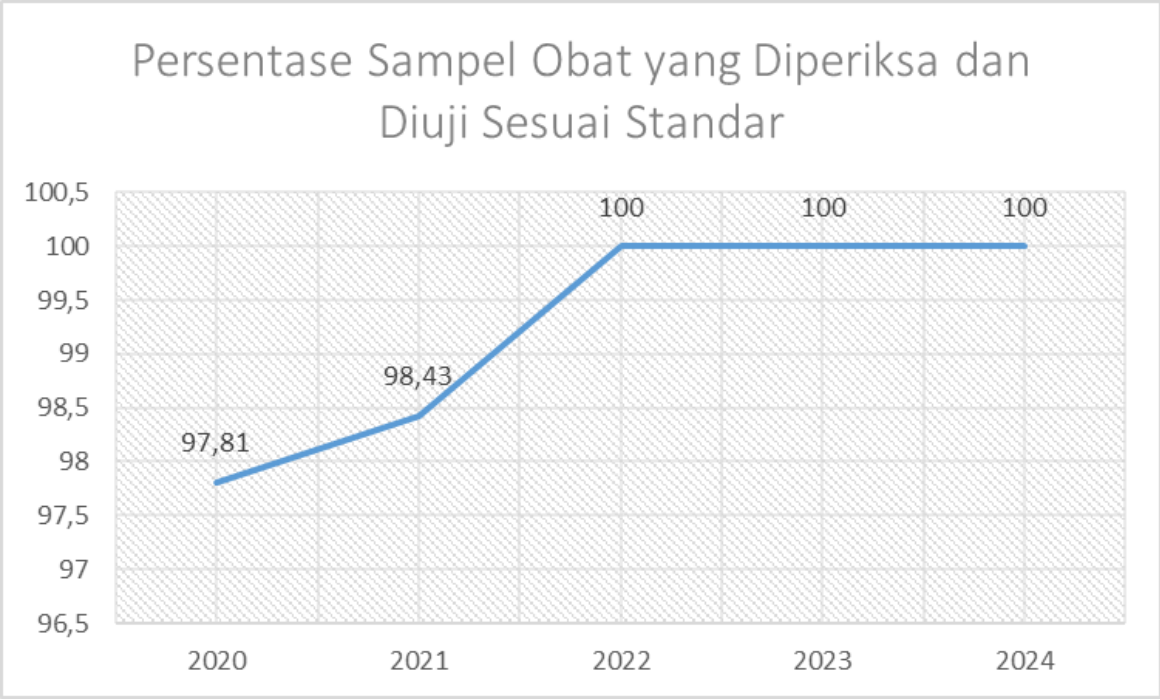


Gambar 1.19 Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 2020-2024

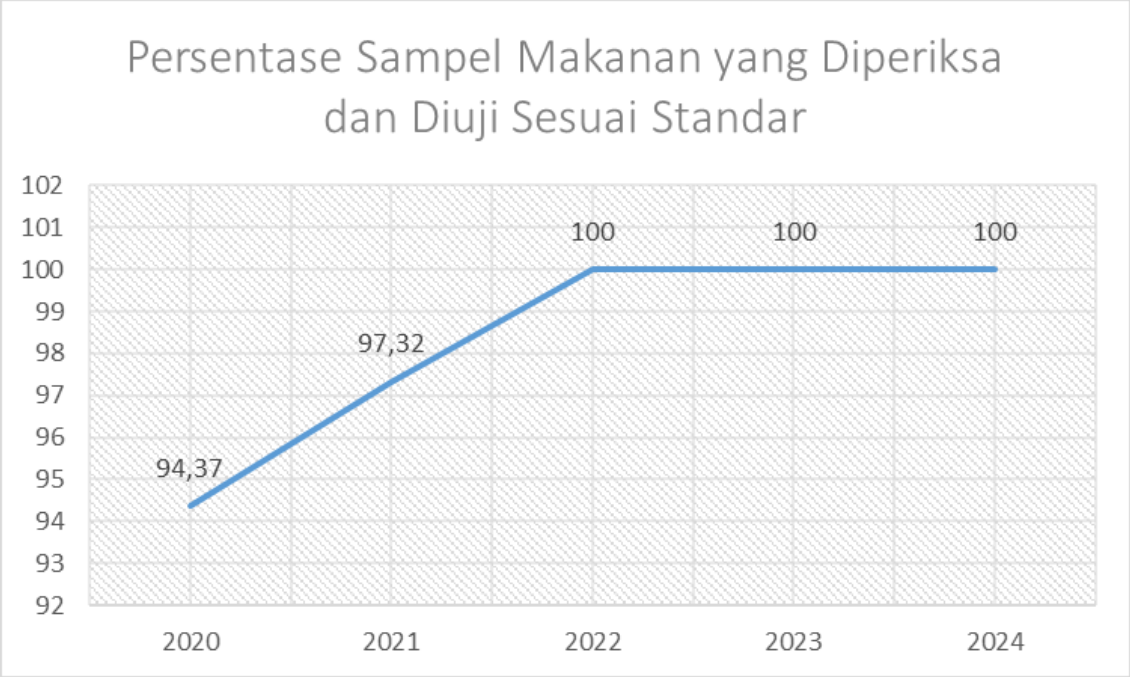
Untuk Sasaran Kegiatan ke-3, analisis tren dihitung terhadap 3 indikator. Semua indikator pada Sasaran Kegiatan ini mengalami **pertumbuhan kinerja meningkat (on the track)**, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator berada dalam jalur yang tepat dan telah mencapai atau bahkan melebihi target yang diinginkan

- 4) **Sasaran Kegiatan IV** : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Pekanbaru, diukur dengan 2

(dua) indikator yaitu (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, kedua indikator tersebut memperoleh capaian kinerja 100%, namun pada kenyataannya masih banyak beredar produk - produk ilegal dan tidak memenuhi syarat. Hal ini menjadi perhatian BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di khususnya meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sampling adalah melalui pembelian dan pemilihan sampel sesuai pedoman sampling, serta penilaian penandaan sesuai ketentuan. Beberapa upaya yang dilakukan di laboratorium pengujian dalam rangka mengawal pencapaian target adalah perencanaan sampling dan pengujian dan melakukan monitoring, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar. Apabila kondisi peralatan dalam keadaan siap dan ketersediaan bahan habis pakai sudah lengkap, maka pengujian dapat dilakukan sesuai dengan standar ruang lingkup parameter uji dan timeline pengujian.

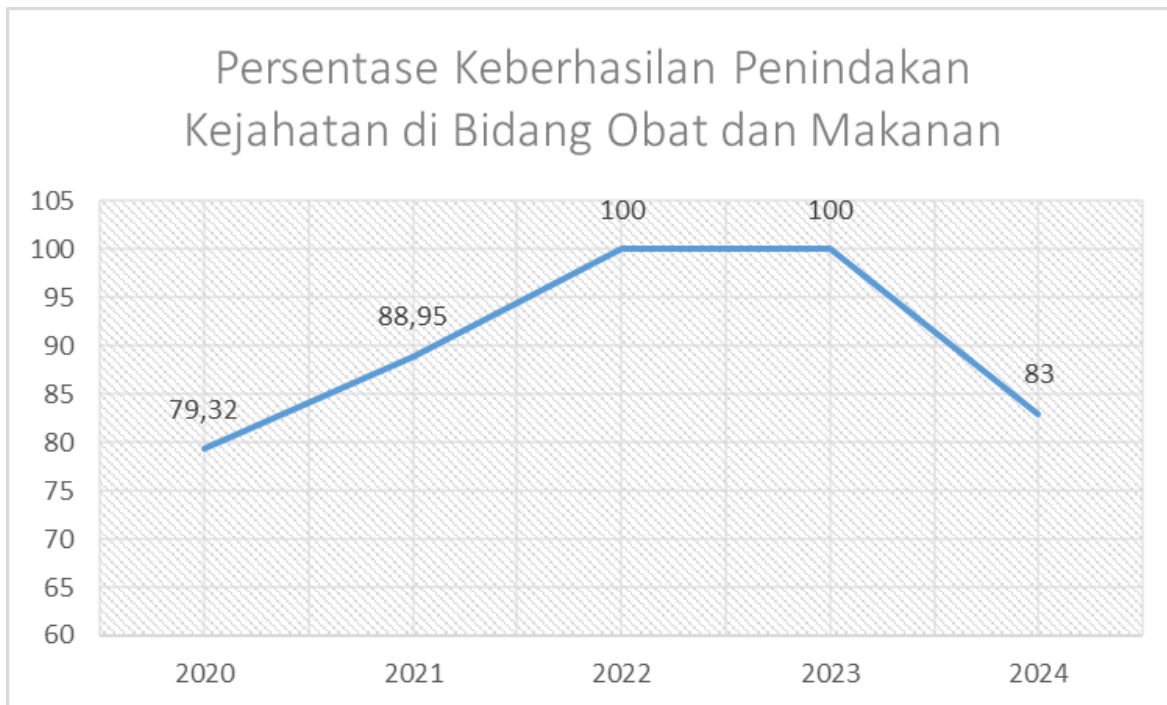


Gambar 1.20 Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 2020-2024



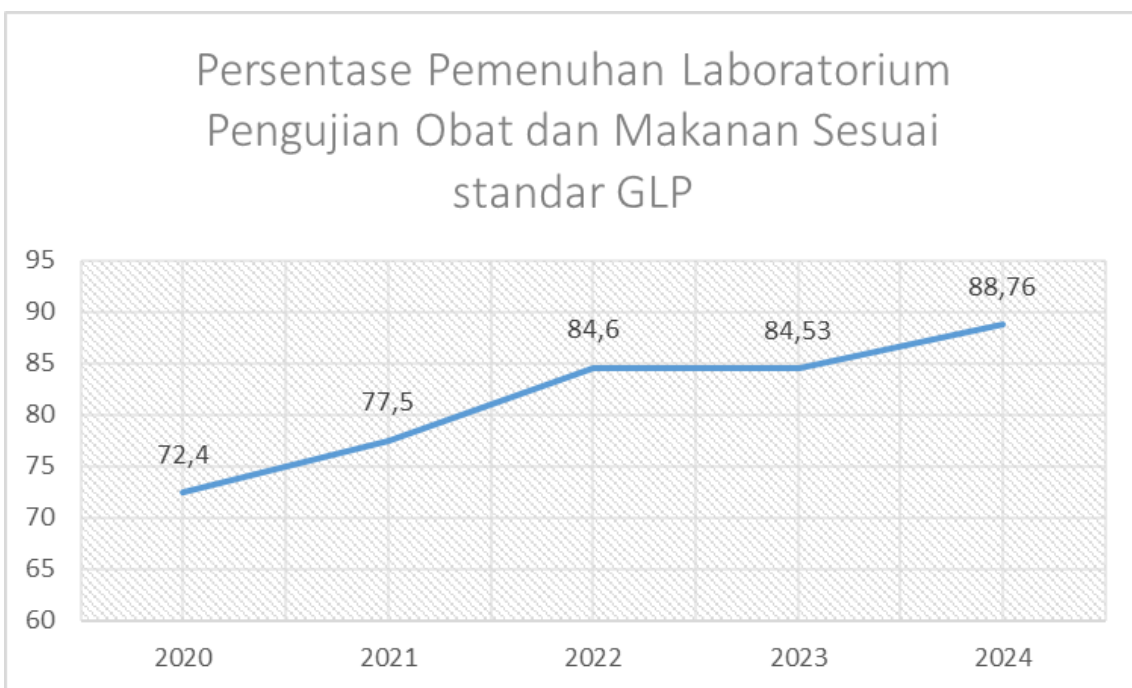
Gambar 1.21 Realisasi persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 2020-2024

- 5) **Sasaran Kegiatan V:** Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Pekanbaru. Indikator tersebut pada tahun 2024 realisasi kinerja tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan Dari 5 (lima) perkara yang menjadi target pada tahun 2024, perkara 1 s.d 4 sudah selesai dilakukan sampai tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti). Sedangkan untuk perkara yang terakhir, terdapat kendala penyelesaian berkas perkaradisebabkan tersangka yang melarikan diri, yang menyebabkan berkas perkara tidak bisa dirampungkan. Posisi tersangka saat inisudah dalam penerbitan Daftar Pencarian Orang dari POLDA Riau. Berkas perkara belum dapat dilanjutkan ke tahap 1 jikatersangka belum ditemukan. Upaya pencarian tersangka telah dilakukan oleh penyidik dengan maksimal, seperti berkoordinasidengan Kejaksaan, POLDA, BINDA, Pertamina (Pelacakan Kendaraan Tersangka), OTO Finance (Pelacakan KendaraanTersangka), BTPN (Terkait Kepemilikan Rumah Tersangka yang masih dalam status cicilan), dan ketua lingkungan setempat.Upaya akan terus dilakukan penyidik sampai tersangka ditemukan. Usaha pencarian juga telah dikoordinasikan ke Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI melalui Direktorat Siber dan Direktorat Intelijen.

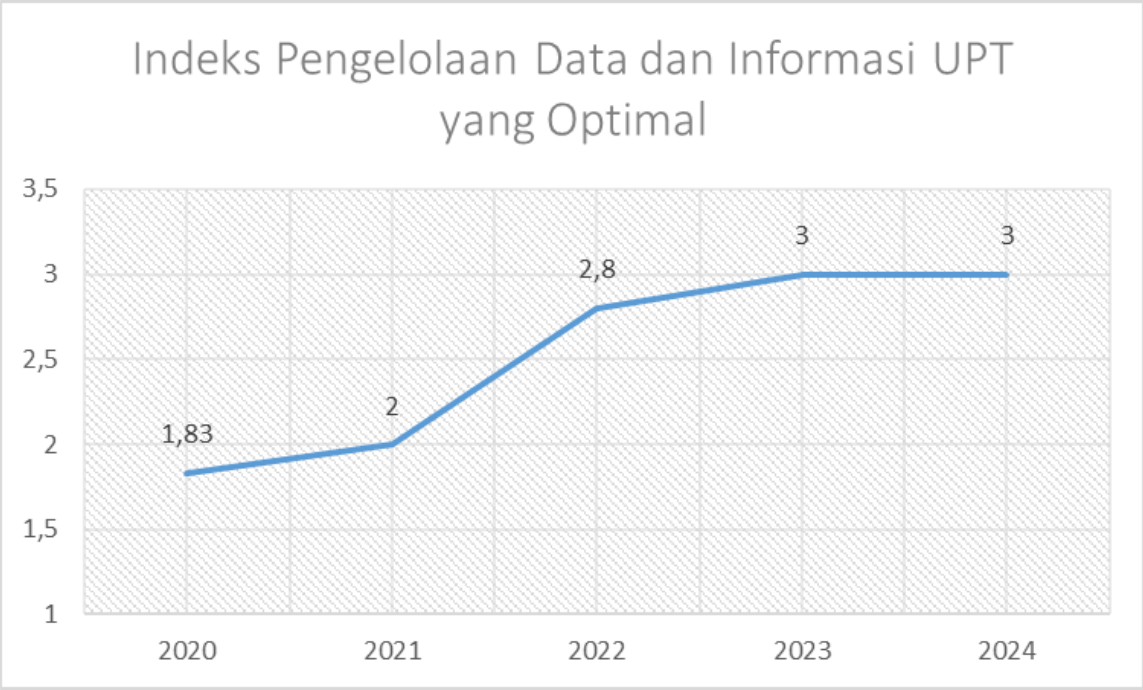


Gambar 1.22 Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan 2020-2024

- 6) **Sasaran Kegiatan VI:** Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makana. Pada Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu: (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan (2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal. Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, capaian kedua indikator tersebut terus meningkat.

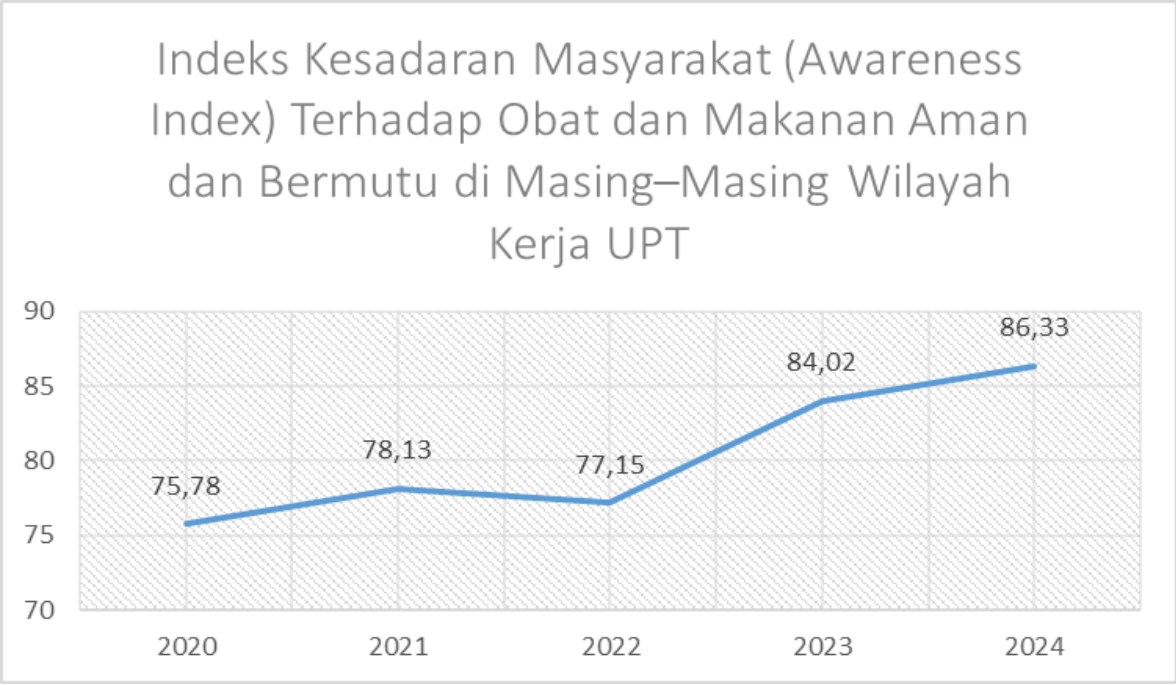


Gambar 1.23 Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP 2020-2024



Gambar 1.24 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal 2020-2024

- 7) **Sasaran Kegiatan VII:** Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Pekanbaru , diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, indikator tersebut memperoleh capaian kinerja di atas 100%, namun demikian pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Hal ini menjadi perhatian BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, utamanya yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat.



Gambar 1.25 Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awereness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT 2020-2024

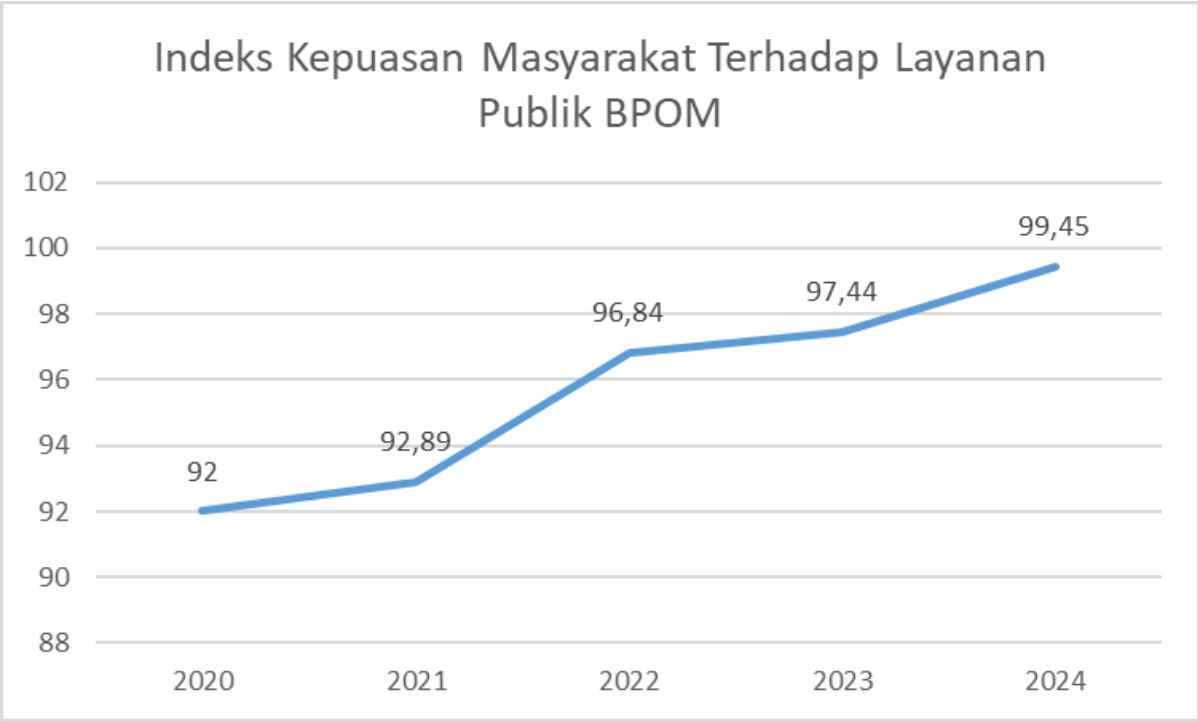
- 8) **Sasaran Kegiatan VIII:** Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Pekanbaru, diukur dengan tiga (3) indikator yaitu (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM. Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, ketiga indikator tersebut memperoleh capaian kinerja di atas 100%.



Gambar 1.26 Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

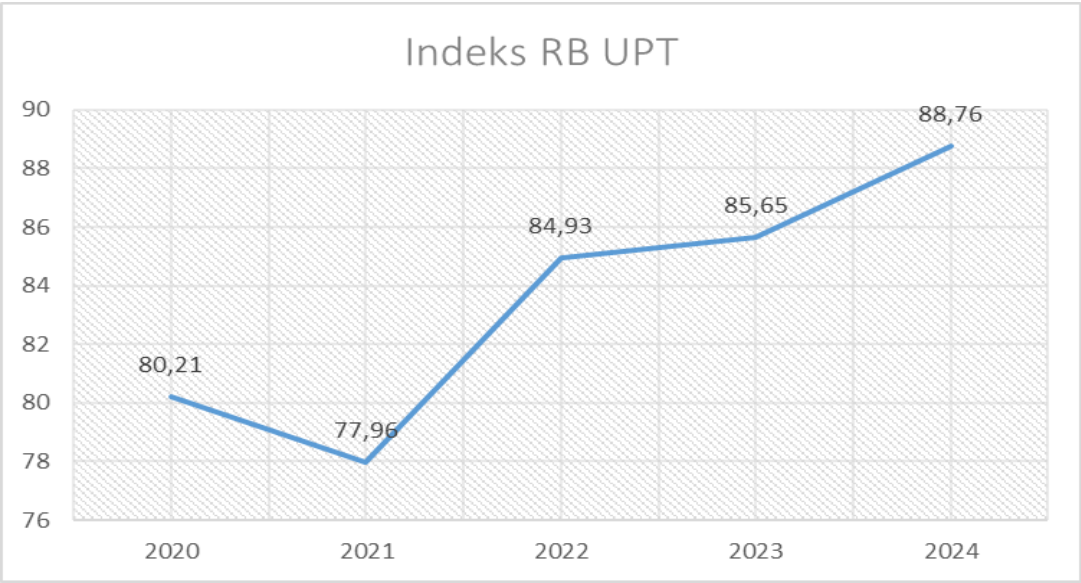


Gambar 1.27 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

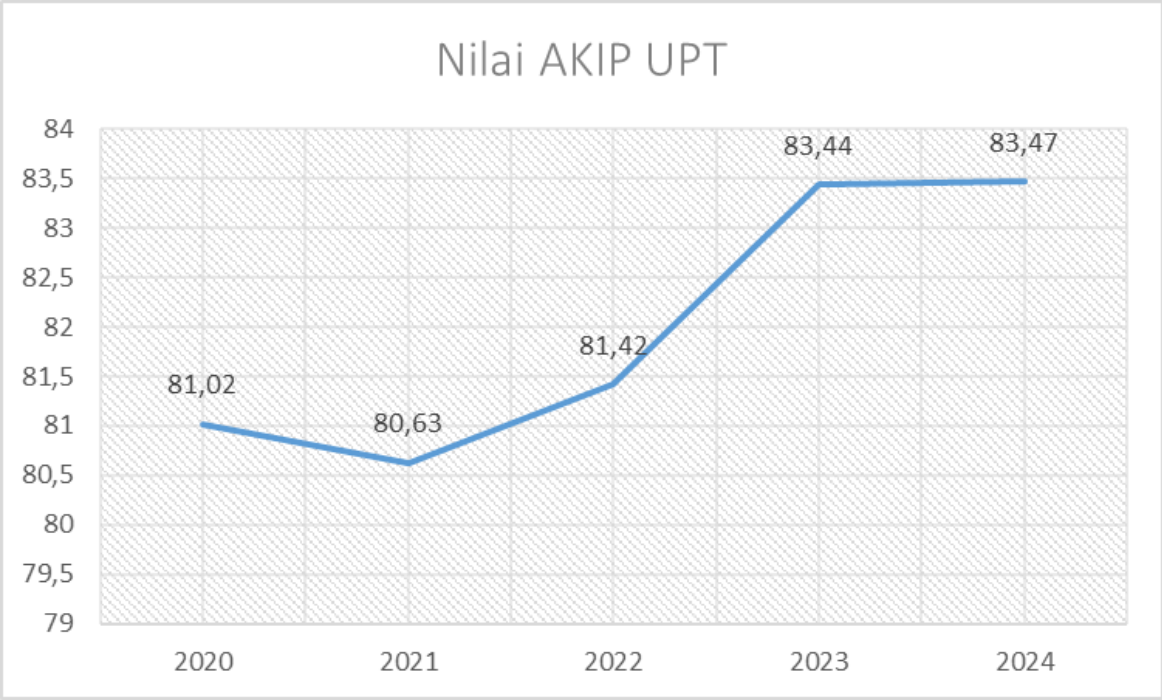


Gambar 1.28 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM 2020-2024

- 9) **Sasaran Kegiatan IX:** Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal, diukur dengan tiga (3) indikator yaitu (1) Indeks RB BBPOM di Pekanbaru, (2) Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru, dan kemudian pada tahun 2024 terdapat IKU Baru yaitu (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan.



Gambar 1.29 Realisasi Indeks RB UTP 2020-2024



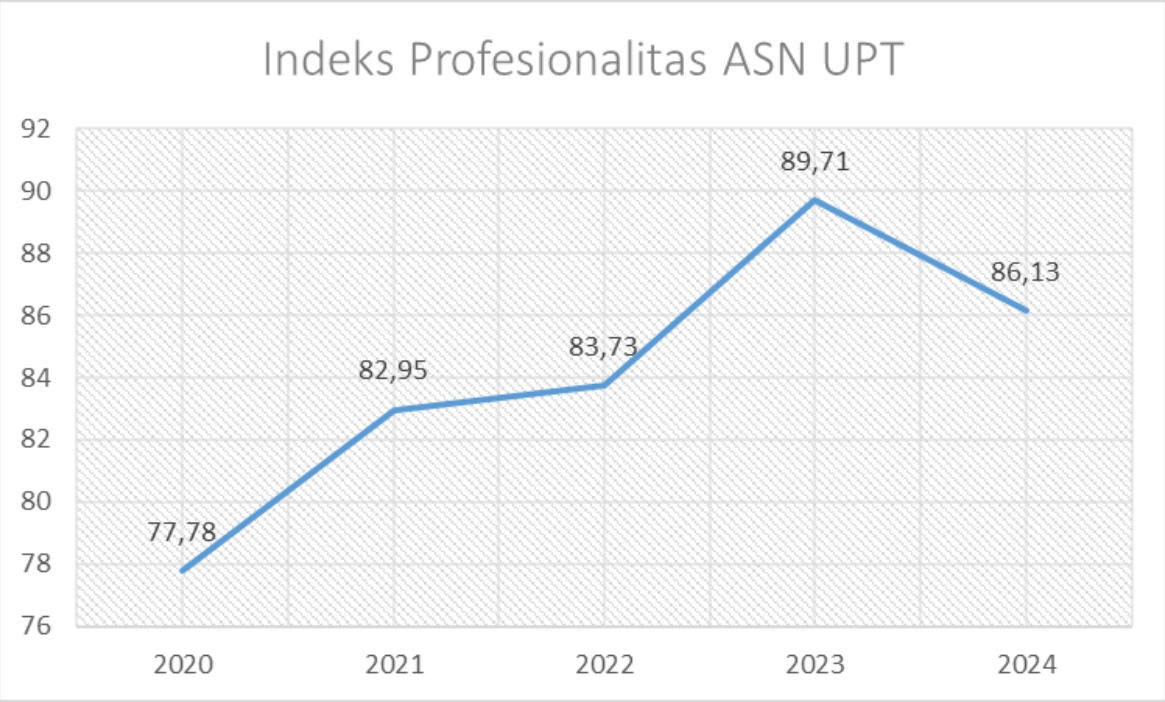
Gambar 1.30 Realisasi Nilai AKIP UPT 2020-2024



Gambar 1.31 Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan 2020-2024

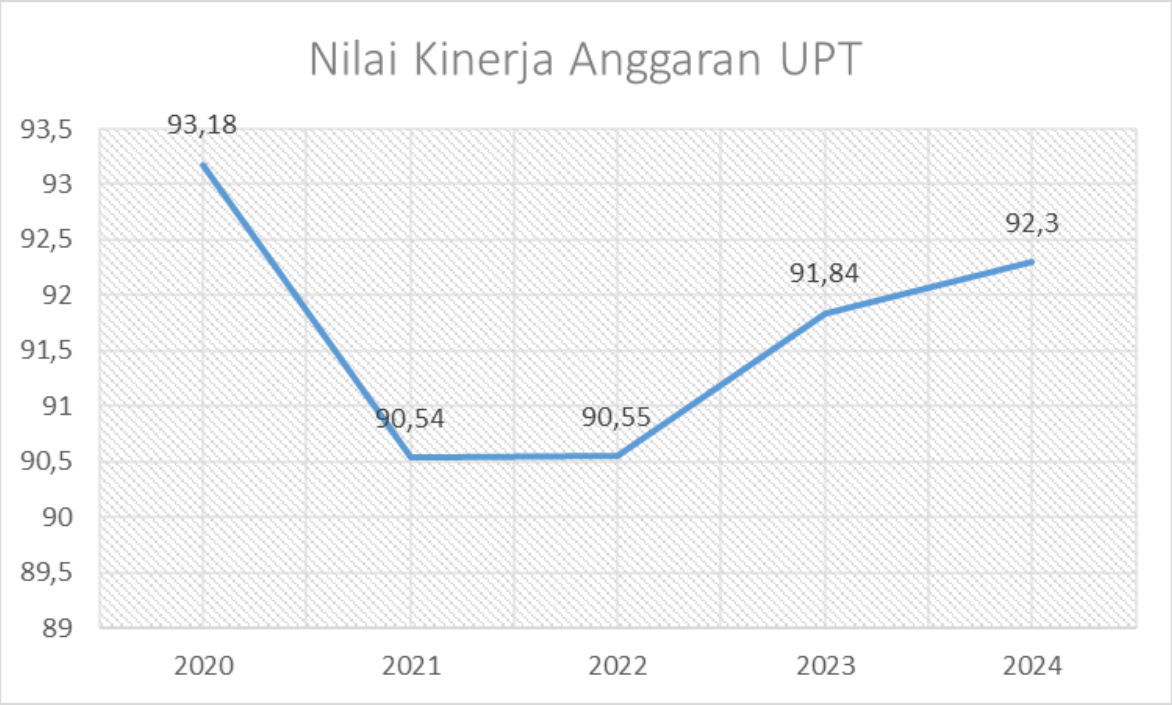
- 10) **Sasaran Kegiatan X:** Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru. Capaian indeks Upaya Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru fluktuatif selama periode 2020 sampai dengan 2024. Upaya terus dilakukan untuk memberikan capaian yang maksimal yaitu dengan Pemantauan pengembangan kompetensi dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan pada rapat monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal

dengan ketat. Diklat untuk Pegawai Teladan/ Pemenang Lomba Inovasi/Arsiparis Teladan.



Gambar 1.32 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT 2020-2024

- 11) **Sasaran Kegiatan XI:** Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel, diukur dengan lima (5) indikator yaitu Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru (1) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru, (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker), (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, (4) Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri dan (5) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT



Gambar 1.33 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT 2020-2024

Realisasi Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menunjukkan bahwa target hanya tercapai pada tahun 2020 dan 2024, sementara pada periode 2021–2023 realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh dua komponen penilaian yang memiliki karakteristik berlawanan. Tingginya penyerapan anggaran berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai IKPA; namun, pada saat yang sama, peningkatan penyerapan anggaran berpotensi menurunkan nilai efisiensi pada EKA. Kondisi ini menyebabkan pencapaian NKA tidak optimal pada tiga tahun tersebut. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024 dilakukan reviu dan penyesuaian terhadap target NKA agar lebih selaras dengan dinamika pelaksanaan anggaran dan komponen penilaiannya.

Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker), Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai tahun 2024, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT diukur hanya pada tahun 2020-2021.



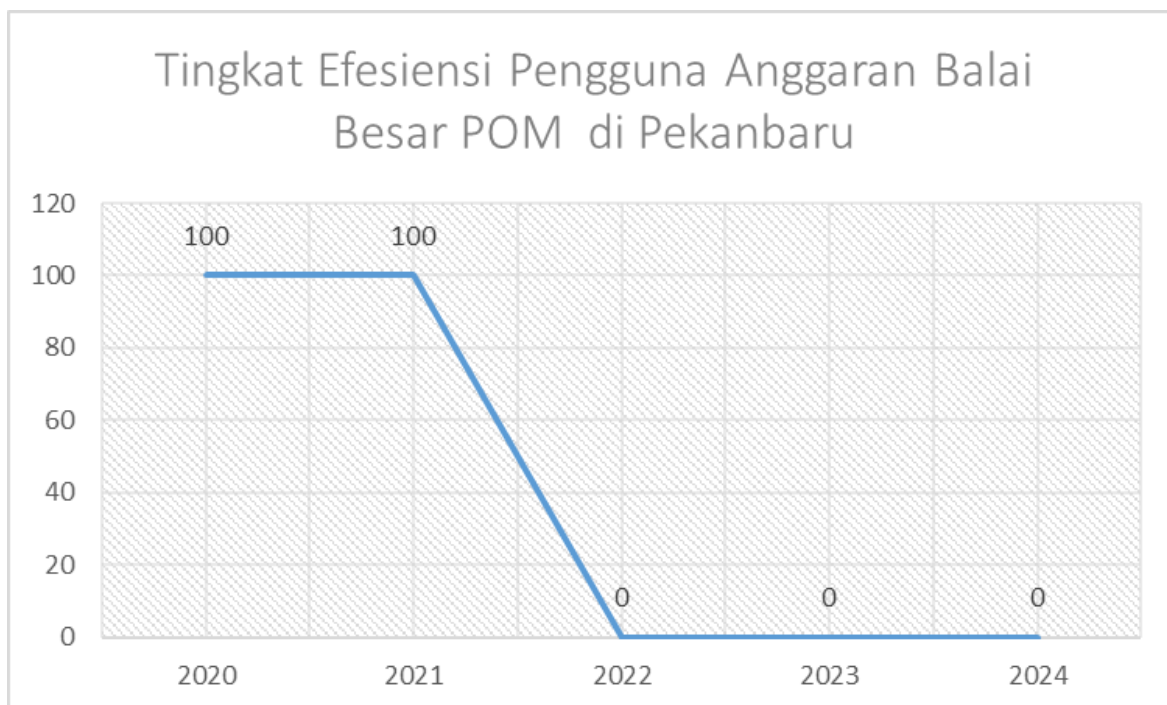
Gambar 1.34 Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 2020-2024



Gambar 1.35 Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 2020-2024



Gambar 1.36 Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 2020-2024



Gambar 1.37 Realisasi Tingkat Efisiensi Pengguna Anggaran Balai Besar POM di Pekanbaru 2020-2024

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Aspirasi masyarakat terhadap BBPOM di Pekanbaru sangat penting karena berperan langsung dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas pelayanan publik di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, aspirasi masyarakat menjadi aspek yang krusial, karena dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan layanan. Aspirasi masyarakat, baik berupa kritik, saran, maupun keluhan, dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Hal ini memungkinkan untuk terus memperbaiki sistem pengawasan, menyesuaikan strategi edukasi dan sosialisasi sesuai kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BBPOM di Pekanbaru dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik, serta mengidentifikasi masalah yang tidak terjangkau oleh pengawasan formal. Hal ini dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan produk ilegal atau membahayakan, serta meningkatkan budaya "konsumen cerdas" yang memahami pentingnya memeriksa label, izin edar, dan kadaluarsa (Cek KLIK). Masukan dari masyarakat dapat memicu inovasi dalam pendekatan edukasi dan pengawasan. Kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem pangan dan obat yang aman.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025–2029, berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan telah dihimpun melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publik lainnya.

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, antara lain perwakilan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok penyandang disabilitas. Forum tersebut menjadi wadah bagi stakeholder untuk menyampaikan pandangan, harapan, serta saran perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik dan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Secara umum, aspirasi dan masukan yang disampaikan stakeholder meliputi:

1. Perlunya percepatan dan penyederhanaan prosedur pelayanan publik, terutama dalam proses perizinan dan pendaftaran izin edar obat dan makanan.
2. Peningkatkan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar memahami persyaratan dan mekanisme perizinan IP CPPOB, mengingat masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem digital OSS dan e-sertifikasi.pom.go.id, sehingga berdampak pada nilai unsur persyaratan pelayanan yang belum optimal.
3. Percepatan waktu pelayanan dan pengujian sampel, termasuk adanya penugasan atau layanan di luar hari kerja untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
4. Peningkatan keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan publik, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif serta memperoleh kepastian dan transparansi dalam pelayanan BBPOM di Pekanbaru.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana dianggap masih kurang karena belum tersedia ruangan khusus untuk menerima layanan sertifikasi sehingga beberapa kali petugas sertifikasi melayani pelaku usaha di area ruang tunggu ULPK dikarenakan ruangan konsultasi telah terisi untuk layanan konsultasi lainnya yang menyebabkan pelaku usaha kurang nyaman dalam menerima layanan
6. Persyaratan yang ditetapkan untuk memenuhi aspek Izin Produksi Cara Pembuatan Produk Obat yang Baik (IP CPPOB) antara lain mengharuskan pelaku usaha memiliki dapur produksi yang terpisah dari dapur rumah tangga. Ketentuan ini sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sebagian besar masih memproduksi di skala rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha belum mampu memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ditetapkan

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pelayanan BBPOM di Pekanbaru berada pada kategori baik, namun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada komponen kecepatan waktu penyelesaian layanan, kejelasan prosedur, dan kemudahan akses informasi. Hal ini sejalan dengan masukan dari peserta forum yang menekankan pentingnya digitalisasi layanan serta peningkatan komunikasi antara petugas dan pengguna layanan.

Berdasarkan berbagai masukan tersebut, BBPOM di Pekanbaru melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik dengan fokus pada:

- Modernisasi dan digitalisasi sistem pelayanan publik serta perizinan;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan dan pengawasan;
- Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- Pengembangan mekanisme pengaduan dan umpan balik publik yang inklusif dan responsif; serta
- Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui kolaborasi lintas sektor.
- Mendorong sinergi lintas sektor dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK serta perusahaan melalui program CSR dalam fasilitasi pembiayaan pembangunan dapur produksi yang memenuhi standar IP CPPOB bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan teknis dan peningkatan daya saing produk lokal.
- Menambah frekuensi sosialisasi pengurusan izin edar BPOM serta meningkatkan jumlah fasilitator pendamping bagi pelaku usaha dalam penyusunan dokumen dan penginputan data ke sistem e-sertifikasi.pom.go.id guna mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu produk
- Menyediakan ruangan khusus layanan sertifikasi yang dilengkapi dengan meja, kursi, komputer, printer, dan pendingin ruangan (AC) guna menciptakan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam melakukan konsultasi dan pengurusan perizinan

Masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, serta mendukung terwujudnya masyarakat Riau yang sehat dan terlindungi dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru 2025-2029. Jika aspirasi masyarakat diperhatikan dan ditindaklanjuti, maka kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Pekanbaru akan meningkat. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan keputusan, serta mendukung keberhasilan jangka panjang dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang berkelanjutan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru 2025-2029, pemahaman yang komprehensif terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi menjadi faktor krusial dalam merumuskan strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan khasiat produk kesehatan dan pangan, BBPOM di Pekanbaru dituntut untuk proaktif dalam mengantisipasi berbagai tantangan kompleks yang muncul.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Pekanbaru dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM di Pekanbaru dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Pekanbaru tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM di Pekanbaru menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang

akan dihadapi pada periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Pekanbaru, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1. Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Pekanbaru di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi kekuatan internal yang signifikan bagi BBPOM di Pekanbaru dalam meningkatkan tata kelola organisasi dan efektivitas kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Komitmen terhadap reformasi diwujudkan melalui peningkatan integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja. Penerapan sistem manajemen kinerja, penguatan budaya pelayanan publik, serta digitalisasi proses administrasi menjadi bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil. Reformasi birokrasi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adaptif terhadap perubahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BBPOM di Pekanbaru. Dengan reformasi yang berkelanjutan, BBPOM di Pekanbaru mampu memperkuat peran dan kapasitas internalnya untuk memberikan pelayanan pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik dan mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan serta memperkuat peran BBPOM di Pekanbaru dalam perlindungan kesehatan masyarakat di Provinsi Riau.

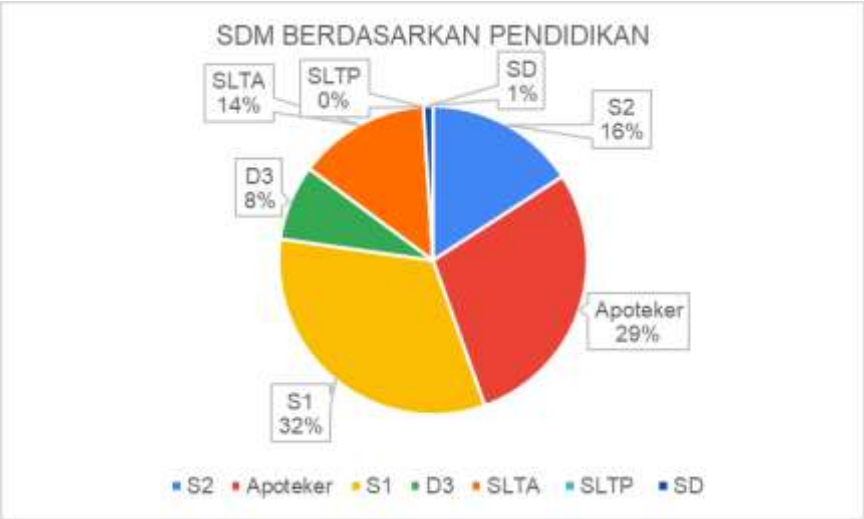
Sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan POM, BBPOM di Pekanbaru turut berkomitmen dalam mendukung terwujudnya kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang kuat dan terukur. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penguatan budaya integritas, serta pelaksanaan pengawasan yang

transparan dan akuntabel di wilayah kerja Provinsi Riau . BBPOM di Pekanbaru secara konsisten melaksanakan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta berperan aktif dalam menjaga efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan penerapan Reformasi Birokrasi Tematik. Upaya ini menjadi wujud nyata kontribusi BBPOM di Pekanbaru dalam memperkuat kepercayaan publik serta mendukung BPOM sebagai lembaga pengawas yang bersih, profesional, dan berdaya saing.

2. SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan profesional

Secara internal, kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengawasan. SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi merupakan kekuatan utama BBPOM di Pekanbaru memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk bagi masyarakat di Provinsi Riau. Kualitas SDM yang memiliki pengalaman teknis, pemahaman mendalam terhadap regulasi, serta integritas tinggi menjadi faktor penentu efektivitas dan ketepatan pelaksanaan pengawasan di lapangan. BBPOM di Pekanbaru juga didukung oleh program pelatihan dan pengembangan kapasitas berkelanjutan yang menjaga kompetensi pegawai agar selalu selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan pengawasan terkini. Profesionalisme, koordinasi lintas sektor yang baik, serta komitmen terhadap pelayanan publik menjadikan SDM BBPOM di Pekanbaru sebagai kekuatan strategis dalam upaya perlindungan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi standar.

BBPOM di Pekanbaru memiliki tingkat pendidikan yang beragam, didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi. Keberagaman ini mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara profesional. Melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan, BBPOM di Pekanbaru berupaya mewujudkan SDM yang unggul dan berintegritas guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.



Gambar 1.38 Tingkat Pendidikan Pegawai ASN BBPOM di pekanbaru Tahun 2024

BBPOM di Pekanbaru memiliki 9 (sembilan) jabatan fungsional dengan kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu. Sebanyak 74.75 persen pegawai merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan 25.25 persen merupakan jabatan fungsional lainnya

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Pengawas Farmasi dan Makanan	74
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2
3	Pranata Keuangan APBN	3
4	Perencana	2
5	Analisis Anggaran	1
6	Analisis SDM Aparatur	1
7	Pranata SDM Aparatur	1
8	Pranata Komputer	2
9	Arsiparis	2
10	Operator Layanan Operasional	2
11	Asisten Kelola Obat dan Makanan	2
12	Pengadministrasi Perkantoran	1
13	Penata Kelola Obat dan Makanan	1
14	Penata Layanan Operasional	2
15	Pengolah data dan Informasi	3
TOTAL		99

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024

3. Komitmen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM

BBPOM di Pekanbaru memiliki komitmen yang kuat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pengembangan inovasi guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BPOM. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan dan penerapan berbagai aplikasi internal dan eksternal yang mendukung efektivitas pengawasan, pelayanan publik, serta tata kelola organisasi. Pemanfaatan TIK tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengawasan obat dan makanan, tetapi juga memperkuat akurasi data, percepatan layanan, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Inovasi yang dilakukan, baik dalam pengawasan, pelayanan publik, maupun manajemen internal, mencerminkan semangat adaptif BBPOM di Pekanbaru terhadap perkembangan digital dan tuntutan era transformasi teknologi. Komitmen ini menjadi kekuatan strategis yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berdaya saing dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat di Provinsi Riau.

Dalam pengelolaan administrasi dan sumber daya internal, BBPOM di Pekanbaru mengembangkan Aplikasi SIPERAN BMN (Sistem Permintaan Persediaan Barang Milik Negara) yang berfungsi untuk mempercepat, mempermudah, dan mengefisienkan proses permintaan serta pengelolaan persediaan barang milik negara secara digital. Aplikasi ini menjadi bentuk nyata reformasi birokrasi melalui optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan aset negara.

Di sisi pelayanan publik, BBPOM di Pekanbaru mengimplementasikan Aplikasi SIOKE (Sistem Online untuk Konsumen) yang merupakan buku tamu digital terintegrasi satu pintu. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan registrasi dan mengakses berbagai layanan publik, seperti layanan informasi dan pengaduan, layanan sertifikat kelayakan instalasi (SKI/SKED), serta layanan pengujian. Kehadiran SIOKE menjadi inovasi pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berbasis kebutuhan konsumen.

Selain itu, inovasi lain seperti MIS RALINE (Monitoring dan Evaluasi Parameter dan Timeline Pengujian) digunakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses pengujian laboratorium, sedangkan Sahabat Penindakan BBPOM di Pekanbaru berperan sebagai wadah informasi dan kolaborasi terkait peredaran produk obat dan makanan ilegal yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

BBPOM di Pekanbaru juga mengembangkan aplikasi **SIPROGREV (Sites Program dan Evaluasi)** untuk meningkatkan kemudahan dan ketertiban dalam pengelolaan data sefta pelaporan menjadi lebih sistematis, akurat, dan mudah diakses. Aplikasi ini menjadi sistem terintegrasi yang menghimpun data perencanaan, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pemanfaatan SIPROGREV mendukung penyusunan rencana, program, dan anggaran yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sistem ini juga memperkuat pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, SIPROGREV berperan sebagai instrumen penting dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja di BBPOM di Pekanbaru.

Berbagai inovasi digital ini mencerminkan komitmen BBPOM di Pekanbaru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses layanan publik. Pemanfaatan TIK dan inovasi digital tersebut menjadi kekuatan strategis internal dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang lebih modern, efisien, dan terpercaya di era transformasi digital

4. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi

BBPOM di Pekanbaru memiliki laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, yang menjadi salah satu kekuatan strategis internal dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Laboratorium ini mampu melakukan pengujian secara valid, akurat, dan terpercaya, sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Selain itu, BBPOM di Pekanbaru berperan sebagai laboratorium regional, memperluas cakupan layanan pengujian bagi wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya, sehingga memperkuat posisi institusi sebagai pusat rujukan teknis pengujian obat dan makanan. Keberadaan laboratorium terakreditasi ini meningkatkan kualitas dan kredibilitas pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti, mendukung pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta makanan.

Dasar hukum penguatan laboratorium regional antara lain Keputusan Kepala BPOM Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 199 Tahun 2023 tentang Tim Regionalisasi Laboratorium BPOM. Regionalisasi laboratorium dilakukan berdasarkan kedekatan wilayah/geografis, kemudahan transportasi, dan pengiriman sampel, serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya pengadaan instrumen, pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, dan bahan pendukung lainnya. Selain itu, regionalisasi meningkatkan efektivitas pengujian

yang diukur melalui perencanaan sampling dan pengujian, produktivitas, kapasitas pengujian, dan responsivitas.

Laboratorium Regional Pekanbaru mencakup Balai Besar/Balai POM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Pangkalpinang, dan Jambi, serta Loka POM di Dumai, Indragiri Hulu, Lubuk Linggau, Tulang Bawang, Sungai Penuh, dan Belitung. Pemilihan laboratorium regional didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain: luas laboratorium, jumlah SDM PFM muda, jumlah instrumen, jumlah kasus Pro Justisia dan Non Pro Justisia, jumlah sarana objek pengawasan, jumlah penduduk, dan posisi wilayah perbatasan atau persimpangan perdagangan internasional.

Dengan struktur laboratorium yang terakreditasi dan terregionalisasi ini, BBPOM di Pekanbaru memiliki kapasitas pengujian yang kuat, efisien, dan responsif, menjadikan institusi ini sebagai kekuatan strategis dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat.

5. Kerja Sama dan Jejaring yang Kuat dengan Pemangku Kepentingan

BBPOM di Pekanbaru berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien, serta berdaya guna tinggi. Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Pekanbaru secara aktif menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Sinergi ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperluas jangkauan edukasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, BBPOM di Pekanbaru berperan dalam integrasi program keamanan pangan dan pengawasan obat dengan kebijakan daerah, termasuk melalui pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM). Bersama aparat penegak hukum, kerja sama difokuskan pada peningkatan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran peredaran obat dan makanan ilegal.

Di sisi lain, kolaborasi dengan perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat basis ilmiah pengawasan dan mendorong inovasi serta penelitian bersama yang mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan pelaku usaha, BBPOM di Pekanbaru membangun kemitraan dalam pembinaan dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi melalui program pembinaan industri dan pelatihan

keamanan pangan. Sementara itu, peran masyarakat dioptimalkan melalui gerakan masyarakat sadar pangan aman serta edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif.

Ke depan, BBPOM di Pekanbaru akan terus memperluas jejaring kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan obat dan makanan, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan terlindungi dari risiko kesehatan

6. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Nasional

BBPOM di Pekanbaru memperoleh dukungan kuat dari berbagai regulasi dan kebijakan nasional yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan. Dukungan ini menciptakan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memberikan arah strategis bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup pengawasan obat dan makanan di daerah.

Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara jelas di wilayah Provinsi Riau Seluruh regulasi tersebut memberikan landasan operasional yang jelas bagi BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Melalui dukungan regulasi dan kebijakan nasional yang kuat, BBPOM di Pekanbaru dapat memperkuat sinergi lintas sektor, memperluas jangkauan pengawasan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di bidang kesehatan masyarakat. Dukungan ini juga menjadi fondasi bagi penguatan inovasi, transformasi digital pengawasan, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis risiko dan berbasis bukti (evidence-based).

7. Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi

BBPOM di Pekanbaru memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi yang mengacu pada standar internasional, yaitu ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015, dan ISO 37001:2016. Ketiga standar ini menjadi pilar utama dalam menjamin mutu hasil pengujian laboratorium, kualitas layanan publik, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan ISO/IEC 17025:2017 memastikan kompetensi teknis laboratorium pengujian BBPOM di Pekanbaru dalam menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini menjamin keandalan metode pengujian, kalibrasi peralatan, serta kompetensi personel laboratorium, sehingga mendukung pengambilan keputusan pengawasan yang berbasis bukti (evidence-based decision making).

Sementara itu, ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) diterapkan untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik, administrasi, dan operasional di lingkungan BBPOM di Pekanbaru berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Melalui sistem ini, setiap unit kerja didorong untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan memastikan keselarasan antara kebijakan mutu, tujuan organisasi, dan capaian kinerja. Sebagai bagian dari upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi, BBPOM di Pekanbaru juga menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Implementasi standar ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Sistem ini juga mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Integrasi ketiga sistem manajemen mutu ini memberikan nilai tambah bagi efektivitas kinerja BBPOM di Pekanbaru. Sinergi antara sistem mutu laboratorium, manajemen mutu layanan, dan manajemen anti-penyuapan menciptakan ekosistem kerja yang kredibel, terpercaya, dan berorientasi pada hasil. Penerapan sistem ini juga memperkuat kepercayaan publik serta memperluas pengakuan nasional dan internasional terhadap kompetensi dan integritas BBPOM di Pekanbaru.

Ke depan, BBPOM di Pekanbaru akan terus mengembangkan sistem manajemen mutu terintegrasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi infrastruktur pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses kerja

8. Program sosialisasi dan pemberdayaan publik yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan

BBPOM di Pekanbaru memiliki kekuatan dalam pelaksanaan program sosialisasi dan pemberdayaan publik yang dilakukan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan. Melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung seperti webinar, penyuluhan KIE serta secara tidak langsung melalui media sosial. BBPOM di Pekanbaru secara aktif meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait pentingnya keamanan, mutu, dan manfaat obat dan makanan. Program ini tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengawasi produk yang beredar di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan duta/kader/ penyuluh di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kegiatan BPOM *Goes to School/Campus/Community*. Pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas menjadikan kegiatan ini lebih efektif dan berdampak luas. Upaya yang berkelanjutan ini mencerminkan komitmen BBPOM di Pekanbaru untuk membangun masyarakat yang cerdas, peduli, dan berdaya dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat.

1.2.2. Kelemahan (Weakness)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, BPOM tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) pada BBPOM di Pekanbaru merujuk pada situasi di mana jumlah, kompetensi, atau penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya seimbang dengan kebutuhan operasional di lapangan. Kondisi ini terlihat dari beban kerja yang tinggi pada kegiatan seperti pengawasan lapangan, pengujian laboratorium, penyuluhan masyarakat, dan pembinaan pelaku usaha, terutama di wilayah luar pusat kota besar, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan.

Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban tugas dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kecepatan layanan publik.

Untuk memastikan perencanaan kebutuhan SDM yang lebih tepat sasaran, BBPOM di Pekanbaru telah melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) secara berkala. Hasil ABK digunakan untuk memetakan kebutuhan pegawai berdasarkan volume, kompleksitas, dan sebaran kegiatan, sehingga penempatan personel dapat dilakukan secara proporsional dan berbasis data. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi area kerja yang membutuhkan tambahan tenaga fungsional tertentu, seperti pengawas farmasi dan makanan, analisis laboratorium, maupun tenaga penyuluh serta menyusun strategi peningkatan kapasitas pegawai agar mampu menyesuaikan dengan tuntutan tugas yang dinamis.

Pelaksanaan ABK juga menjadi dasar dalam pengusulan formasi pegawai baru, redistribusi SDM lintas bidang, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan. Dengan demikian, BBPOM di Pekanbaru dapat menjaga keseimbangan antara jumlah dan kompetensi pegawai dengan beban kerja riil, sehingga mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

2. Adanya gap kompetensi pegawai

Gap kompetensi pegawai BBPOM di Pekanbaru merujuk pada kesenjangan antara tingkat keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dengan yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Kesenjangan ini dapat berdampak pada efektivitas pengawasan obat dan makanan serta kualitas pelayanan publik. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, perbedaan pengalaman dan keahlian antar pegawai, serta meningkatnya kompleksitas tuntutan pekerjaan seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi

Untuk mengatasi kondisi tersebut, dilakukan berbagai strategi seperti pelatihan dan sertifikasi secara berkala, mentoring, kolaborasi antarpegawai, serta evaluasi kinerja yang rutin dan berbasis kompetensi. Kesenjangan pada kompetensi manajerial dan sosiokultural menjadi perhatian khusus karena aspek ini terkait dengan soft competency yang memerlukan waktu, perubahan perilaku, dan pendekatan pembinaan jangka panjang melalui mentoring dan coaching. Sementara itu, kompetensi teknis terus diasah melalui penugasan lapangan, pelatihan teknis, serta pendidikan formal sesuai dengan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Sebagai langkah strategis, BBPOM di Pekanbaru tengah menyusun Learning Roadmap yang mencakup tiga dimensi utama kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural untuk memastikan pengembangan SDM berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Roadmap ini akan menjadi panduan dalam penentuan jenis pelatihan, prioritas peningkatan kapasitas, serta penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan kompetensi organisasi.

Selain itu, penguatan kapasitas juga akan dilaksanakan melalui program mentoring lintas UPT (Unit Pelaksana Teknis) agar terjadi transfer pengetahuan dan praktik terbaik antar Balai POM di seluruh Indonesia. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan kompetensi, meningkatkan profesionalisme pegawai, dan mendorong terciptanya sumber daya manusia yang adaptif, berintegritas, dan unggul dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

3. Pemanfaatan Data dan Informasi Belum Optimal

BBPOM di Pekanbaru belum sepenuhnya mengoptimalkan pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi yang dimiliki sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Data yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi antarbidang maupun dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung analisis kebijakan dan peningkatan efektivitas pengawasan. Kondisi ini menyebabkan potensi informasi strategis yang dimiliki lembaga belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan, BBPOM di Pekanbaru tengah mengembangkan dashboard pengawasan berbasis risiko yang mengintegrasikan berbagai sumber data, meliputi hasil pengujian laboratorium, laporan inspeksi, serta aduan masyarakat. Melalui sistem ini, setiap informasi akan diolah secara analitis untuk memetakan tingkat risiko produk, pelaku usaha, dan wilayah pengawasan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih

cepat, akurat, dan terarah. Selain itu, Diperlukan penguatan sistem manajemen data serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data agar pemanfaatan informasi dapat lebih efektif dan berdaya guna. Penguatan peran unit perencanaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi menuju *evidence-based policy*, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan hasil analisis data dan bukti empiris. Pendekatan ini memungkinkan setiap langkah strategis, seperti penentuan prioritas pengawasan atau penyusunan program pembinaan pelaku usaha, dilakukan secara objektif dan terukur.

Dengan sinergi antara sistem data terintegrasi dan kapasitas analisis perencanaan yang kuat, BBPOM di Pekanbaru diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong terciptanya tata kelola data yang transparan dan adaptif terhadap tantangan di lapangan.

1.2.3. Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan Obat dan Makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Kerja Sama Lintas Sektor yang Solid, Termasuk Dalam Penegakan Hukum

Kerja sama lintas sektor yang solid merupakan fondasi utama dalam memastikan penegakan hukum yang efektif terkait pengawasan Obat dan Makanan. Dalam menghadapi tantangan seperti peredaran obat ilegal, makanan tidak layak konsumsi, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, industri, akademisi, serta masyarakat sangatlah penting. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui beberapa upaya strategis, yaitu: Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga melibatkan institusi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepolisian, Bea Cukai, serta pemerintah daerah untuk berbagi informasi, melakukan operasi gabungan, dan menyusun kebijakan bersama guna memberantas pelanggaran. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi, dengan membentuk basis data terintegrasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap produk ilegal serta mempercepat proses investigasi dan penindakan. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman

dan kemampuan para pihak terkait, termasuk auditor, penegak hukum, dan tenaga kesehatan. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memilih produk yang aman dan sesuai standar melalui kampanye edukasi serta mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, serta Kemitraan dengan Sektor Swasta, mendorong pelaku industri untuk mematuhi regulasi melalui sertifikasi, insentif, dan dukungan dalam pengembangan produk yang memenuhi standar keamanan.

Dengan membangun kerja sama lintas sektor yang kokoh, diharapkan pengawasan terhadap Obat dan Makanan dapat lebih maksimal, sehingga melindungi kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kepercayaan terhadap sistem regulasi yang ada

2. Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Program Sustainable Development Goals (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi peluang strategis bagi BBPOM di Pekanbaru dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan. SDGs memberikan kerangka kerja universal yang mendorong berbagai sektor untuk berkontribusi pada isu-isu global, seperti peningkatan kesehatan, perlindungan lingkungan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan, SDGs memungkinkan BBPOM di Pekanbaru untuk memperluas cakupan pengawasan tidak hanya pada aspek keamanan dan mutu produk, tetapi juga pada dampaknya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) secara langsung relevan dengan upaya BBPOM di Pekanbaru memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar aman, bermutu, dan mendukung pola konsumsi yang sehat. Selain itu, pelaksanaan program SDGs membuka peluang bagi BBPOM di Pekanbaru untuk menjalin kemitraan lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, industri, komunitas lokal, dan organisasi internasional, sehingga efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas teknis, penguatan regulasi, serta edukasi masyarakat.

Sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang khas, BBPOM di Pekanbaru juga dapat memanfaatkan SDGs untuk mendukung pengembangan produk obat tradisional dan pangan lokal yang memenuhi standar internasional. Upaya ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan). Melalui integrasi program SDGs, BBPOM di Pekanbaru dapat memastikan pengawasan

yang komprehensif sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkualitas

3. Adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan jadi MD

Kebijakan pemerintah yang mendorong UMKM untuk melakukan upgrading perizinan menjadi Makanan Dalam (MD) menjadi peluang strategis bagi BBPOM di Pekanbaru dalam meningkatkan kepatuhan dan mutu produk pangan olahan. Program ini memungkinkan UMKM memperoleh sertifikasi resmi, sehingga produknya dapat diedarkan secara legal dan memenuhi standar keamanan, mutu, dan labelisasi yang ditetapkan. Dengan adanya kebijakan ini, BBPOM di Pekanbaru dapat memfasilitasi pendampingan teknis, edukasi, dan supervisi agar proses upgrading perizinan berjalan efektif, sekaligus mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, inovasi produk, dan daya saing di pasar lokal maupun global. Implementasi program ini juga mendukung perlindungan konsumen dan pengawasan pangan yang lebih terintegrasi, sejalan dengan misi BBPOM di Pekanbaru untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk pangan bagi masyarakat.

4. Pertumbuhan UMKM yang pesat di Riau membuka peluang bagi BBPOM di Pekanbaru untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan produk lokal

Perkembangan pesat produk Obat dan Makanan di Provinsi Riau memberikan peluang strategis bagi BBPOM di Pekanbaru untuk memperluas dan mengintensifkan pengawasan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing industri lokal. BBPOM di Pekanbaru berperan dalam memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai standar, serta memfasilitasi industri lokal melalui pelatihan, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis agar dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Upaya ini tidak hanya meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan posisi Provinsi Riau sebagai pusat industri yang inovatif dan terpercaya.

Kerjasama dengan stakeholder, baik pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, asosiasi industri, organisasi masyarakat, maupun lembaga internasional, menjadi peluang strategis bagi BBPOM di Pekanbaru untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan Obat dan Makanan. Melalui kemitraan ini, BBPOM di Pekanbaru dapat memanfaatkan berbagai sumber daya, informasi, dan kapasitas teknis mitra untuk meningkatkan kualitas layanan, melakukan edukasi konsumen, serta memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Kolaborasi lintas sektor memungkinkan implementasi program pengawasan berbasis risiko yang lebih terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi, termasuk e-commerce. Selain itu, kemitraan ini mendukung pengembangan kapasitas industri lokal melalui pelatihan, transfer teknologi, serta pendampingan penerapan standar produksi dan keamanan produk. Dengan dukungan stakeholder, BBPOM di Pekanbaru dapat mendorong inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar aman, bermutu, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Peluang ini juga sejalan dengan misi BBPOM di Pekanbaru untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan, sekaligus membangun ekosistem industri Obat dan Makanan yang berkelanjutan, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

1.2.4. Ancaman (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen. Berikut adalah ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BBPOM di Pekanbaru dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Perkembangan teknologi dan era *society 5.0* telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam transaksi produk sediaan farmasi dan pangan olahan melalui platform daring. Kemudahan akses ini di satu sisi memberikan manfaat, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya kejahatan siber seperti peredaran produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar keamanan. Sistem *user generated content* pada e-commerce memungkinkan siapa pun memasarkan produk tanpa verifikasi yang memadai, sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Pekanbaru dalam memperkuat pengawasan, mempercepat identifikasi produk ilegal, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran di ranah digital melalui pendekatan yang adaptif dan inovatif

2. Masih tingginya Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter

BBPOM di Pekanbaru memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas obat yang beredar di Masyarakat. Ancaman penyerahan antibiotik tanpa resep dokter

yang berisiko terjadinya AMR adalah masalah yang cukup serius. Fenomena serius ini disebabkan oleh beberapa faktor. Masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya menggunakan antibiotik yang tepat dan benar, cenderung menganggap antibiotik sebagai obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini yang mendorong penggunaan antibiotik tanpa resep dokter sehingga meningkatkan risiko AMR. Upaya mengedukasi Masyarakat terkait bahaya menggunakan antibiotik tanpa resep dokter dan dampaknya terhadap AMR telah dilaksanakan namun belum mencapai semua lapisan Masyarakat terutama daerah terpencil atau pedesaan.

Masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan antibiotika ditunjang dengan penjualan antibiotika secara bebas di apotik, toko obat maupun secara daring melalui berbagai *platform e-commerce*, keterbatasan pengawasan yang tidak memadai yang memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk membeli antibiotika tanpa resep dokter. Pemberian sanksi terhadap apotik atau pedagang yang melanggar aturan tentang penjualan antibiotika tanpa resep dokter masih kurang keras menyebabkan terjadinya pelanggaran terus berulang tanpa dampak yang berarti. Faktor penyebab yang memiliki peran juga dalam peningkatan AMR adalah faktor ekonomi, masyarakat tidak mampu untuk berobat ke dokter karena biaya konsultasi yang mahal atau sulit terjangkau sehingga memilih untuk membeli antibiotika secara mandiri di apotik atau toko obat. Pengendalian AMR belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pemerintah Daerah atau OPD terkait, tenaga medis, pelaku usaha dan masyarakat sehingga penanganan atau pengendalian AMR belum optimal atau komprehensif

3. Posisi strategis Provinsi Riau di Selat Malaka meningkatkan ancaman penyelundupan dan kriminalitas lintas negara.

Posisi geografis Provinsi Riau yang strategis, terletak di sepanjang jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Malaysia serta Singapura, memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi dan mobilitas perdagangan. Namun, kondisi ini sekaligus menimbulkan kerentanan terhadap berbagai aktivitas ilegal lintas batas. Kedekatan dengan perairan internasional serta masih terbatasnya pengawasan di wilayah pesisir menyebabkan munculnya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi (*pelabuhan tikus*) yang kerap dimanfaatkan untuk kegiatan penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba.

Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, tetapi juga berpotensi merugikan penerimaan negara dan daerah akibat maraknya peredaran barang tanpa izin resmi. Selain itu, infiltrasi jaringan kriminal lintas negara

melalui jalur laut dapat melemahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan pengawasan maritim, sinergi antarinstansi penegak hukum, serta penguatan peran masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

4. Banyaknya jumlah dan jenis produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar

Banyaknya jumlah dan ragam produk sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Pertumbuhan industri farmasi dan pangan, baik skala besar maupun rumah tangga, serta meningkatnya arus distribusi produk dari luar daerah maupun luar negeri, menuntut pengawasan yang semakin intensif dan komprehensif.

5. Tingginya biaya pengujian produk menjadi kendala bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban registrasi dan legalitas produk

Tingginya biaya pengujian produk masih menjadi salah satu kendala utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban registrasi dan legalitas produk. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan UMKM terhadap regulasi di bidang obat dan makanan, terutama dalam proses pemenuhan standar mutu dan keamanan produk. Keterbatasan kemampuan finansial menyebabkan sebagian pelaku UMKM menunda atau bahkan tidak melakukan registrasi produk secara resmi, sehingga berpotensi menurunkan jaminan mutu produk yang beredar di pasaran. Permasalahan ini juga mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru, karena masih terdapat banyak produk yang beredar tanpa izin edar yang sah. Di sisi lain, biaya pengujian yang relatif tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan jumlah produk lokal yang terdaftar secara legal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan dan fasilitasi yang lebih terarah, seperti penyederhanaan proses, kerja sama dengan laboratorium mitra, maupun program pendampingan khusus bagi UMKM. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan teknis, asistensi pemenuhan regulasi, serta bimbingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Melalui pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang berpihak pada peningkatan daya saing UMKM, BBPOM di Pekanbaru diharapkan mampu mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi sekaligus memperluas jangkauan produk yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus melindungi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, luasnya wilayah pengawasan yang meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak sebanding dengan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah pengawas serta sarana pendukung pengujian menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh titik distribusi dan peredaran produk secara optimal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko beredarnya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BBPOM di Pekanbaru perlu memperkuat strategi pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kompetensi dan jumlah SDM pengawas, serta memperluas jejaring koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penguatan sinergi lintas sektor diharapkan dapat mendukung efektivitas pengawasan, perlindungan konsumen, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Riau.

6. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha dan Masyarakat

Ancaman akan ini muncul ketika pelaku usaha, baik yang berskala besar maupun kecil, belum sepenuhnya memahami dan mematuhi regulasi serta standar keamanan produk. Akibatnya, mereka mungkin melakukan praktik produksi atau distribusi yang tidak sesuai, secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Di sisi lain, rendahnya literasi masyarakat tentang bahaya produk ilegal atau tidak aman membuat mereka rentan menjadi korban, bahkan terkadang tanpa disadari mendukung peredaran produk berbahaya. Situasi ini menciptakan tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi secara efektif. Tanpa peningkatan kesadaran dari kedua belah pihak, upaya perlindungan kesehatan masyarakat akan terhambat dan melemahkan kapasitas BPOM dalam menciptakan ekosistem obat dan makanan yang aman.

Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
▪ Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang Kuat dan Terukur ▪ SDM pengawasan obat dan makanan yang kompeten dan professional ▪ Komitmen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta	▪ Keterbatasan dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) ▪ Adanya gap kompetensi pegawai ▪ Pemanfaatan Data dan Informasi Belum Optimal

Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM ▪ Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi ▪ Kerja Sama dan Jejaring yang Kuat dengan Pemangku Kepentingan ▪ Dukungan Regulasi dan Kebijakan Nasional ▪ Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi ▪ Program sosialisasi dan pemberdayaan publik yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan	
PELUANG	ANCAMAN
▪ Kerja Sama Lintas Sektor yang Solid, Termasuk Dalam Penegakan Hukum ▪ Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) ▪ Adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan jadi MD ▪ Pertumbuhan UMKM yang pesat di Riau membuka peluang bagi BBPOM di Pekanbaru untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan produk lokal	▪ Kejahatan Siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ▪ Masih tingginya Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ▪ Posisi strategis Provinsi Riau di Selat Malaka meningkatkan ancaman penyelundupan dan kriminalitas lintas negara ▪ Banyaknya jumlah dan jenis produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar ▪ Tingginya biaya pengujian produk menjadi kendala bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban registrasi dan legalitas produk ▪ Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha dan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, BBPOM di Pekanbaru perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BBPOM di Pekanbaru periode 2025-2029. Strategi-strategi tersebut dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Kegiatan dituangkan dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Untuk itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran BBPOM di Pekanbaru.

2.1 VISI

Balai Besar POM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Melalui Visi BPOM untuk periode 2025-2029 tersebut juga menjadi visi dari BBPOM di Pekanbaru sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM. Dimana didalam visi tersebut mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi diatas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi presiden terpilih. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar diatas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Serta Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha Dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya

2. Memfasilitasi Percepatan Pengembangan Dunia Usaha Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Termasuk UMKM Dalam Rangka Membangun Struktur Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industry. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Dengan Mengembangkan Kemitraan Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya Untuk Memberikan Pelayanan Publik Yang Prima Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

BBPOM di Pekanbaru sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**
Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai Besar POM di Pekanbaru sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4 SASARAN KEGIATAN BBPOM DI PEKANBARU TAHUN 2025 – 2029

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BBPOM di Pekanbaru, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BBPOM di Pekanbaru telah merumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025

– 2029. Sasaran kegiatan ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator:

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
	Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
			Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
	Indikator:	Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan	Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator:

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Nilai AKIP UPT BPOM Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BBPOM di Pekanbaru untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru sebagaimana tercantum

Tabel 2. 3 Indikasi Resiko Sasaran Kegiatan BBPOM di Pekanbaru

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko		Indikasi Perlakukan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya jumlah kasus KLB KP secara nasional	a	Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP.	Inspeksi, Pengujian, Infokom
			b	Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	Infokom
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BBPOM di Pekanbaru	a	Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek	Sertifikasi, Inspeksi
			b	Pendampingan oleh petugas BBPOM di Pekanbaru baik melalui pengawasan pre market maupun post market	Sertifikasi, Inspeksi
			c	Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha	Sertifikasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			d	Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	Inspeksi
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a	Berkoordinasi dengan Dinas Terkait dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Daerah	Inspeksi
			b	Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Infokom
			c	Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan.	Inspeksi, Infokom
		Kurangnya pemenuhan standar kemampuan laboratorium dalam	a	Meningkatkan kompetensi SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana pengujian	Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		memenuhi kebutuhan pengawasan	b	Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan grand desgin pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pemenuhan kemampuan laboratorium dan kondisi laboratorium BBPOM di Pekanbaru secara berkala.	Pengujian
		Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan tanpa analisis kewajaran, maupun oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat.	a	Melakukan pencegahan melalui implementasi audit distribusi antibiotik oleh PBF, termasuk kewajiban analisis kewajaran permintaan obat termasuk antibiotik.	Inspeksi
			b	Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan Bimtek/Penyuluhan/Informasi dan Edukasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak.	Inspeksi, Infokom
			c	Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	Inspeksi, Infokom
		Masih beredarnya produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi syarat	a	Melakukan intensifikasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah pengawasan BBPOM di Pekanbaru	Inspeksi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan fortifikasi	a	Melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah pengawasan BBPOM di Pekanbaru	Inspeksi
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	a	Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi, penyebaran informasi obat dan makanan serta monitoring dan evaluasi.	Infokom
			b	Peningkatan fungsi fasilitator dalam program KIE	Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan oleh pelaku usaha	a	Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM sediaan farmasi dan pangan olahan.	Sertifikasi
			b	Peningkatan fungsi fasilitator dalam program pendampingan UMKM	Sertifikasi
			c	Pendampingan UMKM berupa desk dan Bimtek terkait cara produksi yang baik	Sertifikasi
			d	Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMKM	Sertifikasi
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a	Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri	Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko		Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			b	Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.	Penindakan
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	a	Melakukan kegiatan patroli siber secara rutin, pelaporan tautan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal untuk dilakukan rekomendasi <i>takedown</i>	Penindakan
			b	Melakukan perkuatan sumber daya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring	Penindakan
		Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	a	Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional.	Penindakan
			b	Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber.	Penindakan
			c	Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Belum maksimalnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik		Meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam pelayanan publik	Tata Usaha, Infokom, Sertifikasi, Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko		Indikasi Perlakukan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a	Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat.	Tata Usaha, Infokom, Sertifikasi, Inspeksi, penindakan Pengujian
			b	Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja.	Tata Usaha, Infokom, Sertifikasi, Inspeksi, penindakan Pengujian
			c	Sosialisasi Anti Fraud	Tata Usaha, Infokom, Sertifikasi, Inspeksi, penindakan Pengujian
			d	Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan obat dan makanan	Tata Usaha, Infokom, Sertifikasi, Inspeksi, penindakan Pengujian

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi

bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bias didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
- 6) Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkat kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
- 7) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM di PEKANBARU

Arah kebijakan BBPOM di Pekanbaru sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Pekanbaru mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititik beratkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggaris bawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bias didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititik beratkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Pekanbaru meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BBPOM di Pekanbaru fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri

sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan :** BBPOM di Pekanbaru memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BBPOM di Pekanbaru dan kepercayaan terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BBPOM di pekanbaru fokus meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat kualitas pengujian laboratorium, mengoptimalkan analisis kebijakan, serta mendorong transformasi digital dalam rangka memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Pekanbaru.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BBPOM di pekanbaru memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan arah kebijakan sepanjang pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029, BBPOM di Pekanbaru telah menyusun strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan hasil analisis SWOT yang sejalan dengan Strategi BPOM. Berikut strategi yang telah disusun BBPOM di Pekanbaru untuk periode 2025-2029:

- a. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan

- olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- b. Penguatan kerjasama lintas sektor yang aktif dan solid, serta memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan
 - c. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
 - d. Peningkatan efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
 - e. Penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kemitraan strategis, integrasi sistem informasi pengawasan, peningkatan kapasitas aparat dan pemerintah daerah, pelaksanaan operasi pengawasan terpadu, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta penyelarasan kebijakan dan program antar-instansi untuk mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Pekanbaru.
 - f. Peningkatan kapasitas dan pengelolaan SDM BBPOM di Pekanbaru dan sarana prasarana, peningkat kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
 - g. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Pekanbaru termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Pekanbaru 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
Penguatan penindakan kejahatan	Penguatan kerjasama lintas sektor yang

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
berbasis elektronik	peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasai arah kebijakan dan strategi BBPOM di Pekanbaru juga dilaksanakan secara resposif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru selama tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Arah Kebijakan dan Strategi dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Pekanbaru melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia” dengan fokus pada penguatan pengawasan pre-market dan post-market terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk pengawalan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan olahan. Khusus dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, BBPOM di Pekanbaru menerapkan pengawalan mutu untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi standar keamanan pangan. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kapasitas laboratorium secara berkelanjutan untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) dan Good Laboratory Practice (GLP), meliputi pengembangan ruang lingkup pengujian, kalibrasi peralatan, serta penguatan kompetensi personel.

Dalam konteks pengawasan pre-market, BBPOM di Pekanbaru menjalankan kewenangan tertentu yang tidak mencakup penyusunan standar, tetapi berfokus pada pemeriksaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi untuk memastikan pemenuhan berbagai standar seperti CPOTB, CPKB, CPPOB, CDOB, dan SMKPO. Kegiatan ini mencakup penerbitan izin, rekomendasi teknis, serta sertifikat hasil uji yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Selaras dengan itu, pembinaan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM terus diperkuat melalui pendampingan intensif agar dapat memenuhi persyaratan produksi yang baik, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses legalitas produk.

Pada aspek penegakan hukum (*post market control*), BBPOM di Pekanbaru melaksanakan penyidikan *pro-justitia* terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini mencakup gelar perkara, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, serta analisis kejahatan siber dan *profiling* pelaku pelanggaran daring sebagai bentuk deteksi dini terhadap peredaran produk ilegal di platform digital.

Selain pengawasan teknis, BBPOM di Pekanbaru juga memberikan layanan informasi, edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan melalui sosialisasi, kampanye publik, serta pendekatan berbasis komunitas di sekolah, fasilitas kesehatan, dan lingkungan masyarakat umum. KIE Farmakovigilans bagi tenaga kesehatan turut ditingkatkan untuk mendorong pelaporan efek samping obat secara lebih aktif. Upaya pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di satuan pendidikan. Seluruh kegiatan ini diperkuat melalui advokasi lintas sektor dan koordinasi pengawasan untuk memastikan tindak lanjut yang efektif dan berkelanjutan. Layanan pengaduan dan informasi publik juga disediakan melalui berbagai kanal untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Sebagai satuan kerja di daerah, BBPOM di Pekanbaru tidak hanya berperan dalam pelaksanaan tugas teknis pengawasan, tetapi juga menjalankan fungsi manajerial dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi BPOM. Komitmen ini tercermin dalam pemeliharaan mutu hasil pengujian melalui penggunaan alat standar, pengelolaan administrasi penyidikan yang tertib, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Penguatan manajemen internal ini menjadi landasan penting bagi keberhasilan seluruh fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru merupakan fungsi pendukung yang sangat vital dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan operasional pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau. Pengelolaan ini diarahkan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan internal melalui tiga pilar utama, yaitu realisasi belanja pegawai, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), serta pemeliharaan infrastruktur yang menunjang seluruh kegiatan pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Pekanbaru menetapkan pemenuhan hak serta peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai prioritas melalui pengelolaan belanja pegawai yang tertib, akurat, dan tepat waktu. Pengelolaan belanja pegawai dilaksanakan secara sistematis melalui perencanaan kebutuhan pegawai, verifikasi dan validasi data pembayaran, serta rekonsiliasi berkala dengan unit terkait. Seluruh proses administrasi keuangan dioperasikan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang menjadi platform resmi pengelolaan anggaran pemerintah, dengan pemanfaatan modul komitmen, pembayaran, dan bendahara guna menjamin transparansi, integritas data, akurasi perhitungan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan negara.

Penggunaan Gaji Web Kemenkeu dan aplikasi GPP mendukung rekonsiliasi belanja pegawai secara terintegrasi, termasuk otomasi perhitungan gaji, pencetakan slip gaji, dan pelaporan pajak. Integrasi sistem tersebut meminimalisasi risiko kesalahan perhitungan maupun penginputan data, sehingga pemenuhan hak-hak pegawai dapat dilaksanakan secara tepat dan akurat. Pembayaran gaji, tunjangan kinerja, honorarium, serta hak-hak pegawai lainnya disalurkan secara konsisten melalui mekanisme SAKTI guna menjaga motivasi, profesionalisme, dan kinerja aparatur dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang menuntut ketelitian dan tanggung jawab tinggi.

Pemantauan dan evaluasi atas realisasi belanja pegawai dilakukan melalui dashboard monitoring SAKTI untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, serta kesesuaian pelaksanaan dengan pagu anggaran dan standar administrasi keuangan pemerintah. Pengelolaan belanja pegawai yang terstruktur dan akuntabel ini menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Pekanbaru.

Di sisi lain, akuntabilitas tata kelola aset negara diperkuat melalui manajemen BMN yang dilaksanakan secara komprehensif. Proses ini meliputi penatausahaan yang tertib, penilaian aset, pengalihan status, monitoring dan verifikasi fisik berkala, hingga penyusunan laporan BMN yang transparan, akurat, dan sesuai ketentuan regulasi. Pengelolaan yang baik ini menjadi fondasi penting bagi efisiensi penggunaan aset negara dalam mendukung tugas pengawasan. Tata kelola Barang Milik Negara melalui :

- Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM (SIMAN) dan aplikasi internal BPOM
- Inventarisasi rutin BMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir barang tidak ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang Nomor

Urut Pendaftaran (NUP) dengan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

- c. BBPOM di Pekanbaru memanfaatkan aplikasi berbasis web (SIPERAN) untuk mendukung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya persediaan, sehingga proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat

Untuk memastikan seluruh kegiatan teknis dapat berjalan tanpa hambatan, BBPOM di Pekanbaru juga melaksanakan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana operasional, termasuk fasilitas kantor, laboratorium, dan sarana pendukung lapangan. Penyediaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan fungsional bertujuan menciptakan kondisi kerja yang kondusif serta mendukung produktivitas aparatur dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar, BBPOM di Pekanbaru memprioritaskan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Penguatan fasilitas laboratorium pengujian melalui pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium berteknologi terkini untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan cakupan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. Modernisasi sarana inspeksi dan operasional, termasuk penyediaan peralatan *field test*, alat ukur portabel, serta kendaraan operasional untuk mendukung efektivitas kegiatan pengawasan di lapangan.
- c. Peningkatan sistem teknologi informasi dan digitalisasi layanan, seperti pengembangan sistem pelaporan pengawasan berbasis elektronik, integrasi data dengan pusat, serta optimalisasi penggunaan aplikasi pengawasan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
- d. Penguatan sarana pendukung mutu dan keselamatan kerja, meliputi pemenuhan area penyimpanan sampel yang sesuai standar, serta peralatan K3 untuk menunjang keamanan personel laboratorium dan pengawasan.
- e. Perbaikan dan pemeliharaan prasarana gedung dan ruang layanan, guna memastikan seluruh sarana kerja memenuhi standar teknis, mendukung kenyamanan, serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
- f. Peningkatan infrastruktur pendukung kerja seperti perbaikan system kelistrikan, AC, laboratorium, jaringan internet, generator dan fasilitas pendukung teknologi informasi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat Sasaran Kegiatan yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih oleh BBPOM di Pekanbaru selama periode lima tahun.

Tabel 4. 1 Matriks Kinerja BBPOM di Pekanbaru 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88.25	89.50	90.75	92.00	93.25
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	92	93	94	95
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	87	89	92	95
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	83.00	83.50	84.00	84.50	85.00
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	92	93	94	95.5
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	92	93	94	95

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97.25	97.63	98.25	98.88	99.50
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	92	93	94	95
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95.40	96.00	96.60	97.20	98.00
		12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	91	92	93	94	95
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75.1	79.8	82.3	84.8	87
		15	Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman	16,67	33,33	50	66,67	83,33
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	80	80	80	100
3	Meningkatnya Efektivitas KIE	18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,90	88,78	89,66	90,54	91,42
		19	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	15	16	17	18	20
		20	Jumlah Desa Pangan Aman	4	7	7	7	7
		21	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	1	1	2

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13.99	30.57	48.19	66.84	86.01
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80	81	82	83	84
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang Prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.26	88.47	88.68	88.89	89.1
		27	Nilai AKIP UPT BPOM	83.97	84.57	85.27	86.02	86.82
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9	2.95	3	3.05	3.1

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan BPOM periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan BBPOM di Pekanbaru 2025-2029 Berdasarkan Program

Program	Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 22.065,45	Rp 25.544,15	Rp 28.879,03	Rp 32.000,51	Rp 37.725,26
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 15.667,50	Rp 15.571,95	Rp 17.129,15	Rp 18.842,07	Rp 20.726,27
Total	Rp 37.732,95	Rp 41.116,10	Rp 46.008,18	Rp 50.842,58	Rp 58.451,53

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan BBPOM di Pekanbaru 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	Rp 35.905,74	Rp 39.288,89	Rp 43.799,79	Rp 48.402,13	Rp 55.645,86
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp 1.827,21	Rp 1.827,21	Rp 2.208,39	Rp 2.440,44	Rp 2.805,67
Total	Rp 37.732,95	Rp 41.116,10	Rp 46.008,18	Rp 50.842,58	Rp 58.451,53

BAB V PENUTUP

Renstra BBPOM di Pekanbaru 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra BBPOM di Pekanbaru 2025- 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, Sasaran Kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Renstra BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan pendanaan BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Pekanbaru			Balai Besar POM di Pekanbaru						37.732,95	41.116,10	46.008,18	50.842,58	58.451,53	Balai Besar POM di Pekanbaru
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Balai Besar POM di Pekanbaru						22.065,46	25.544,15	28.879,03	32.000,51	37.725,25	Balai Besar POM di Pekanbaru
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru											Balai Besar POM di Pekanbaru
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	88.25	89.50	90.75	92.00	93.25						Balai Besar POM di Pekanbaru
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai Besar POM di Pekanbaru	26	27	28	29	30						Balai Besar POM di Pekanbaru
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	91	92	93	94	95						Balai Besar POM di Pekanbaru
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai Besar POM di Pekanbaru	100	100	100	100	100						Balai Besar POM di Pekanbaru

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	85	87	89	92	95						Balai Besar POM di Pekanbaru
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai Besar POM di Pekanbaru	83.00	83.50	84.00	84.50	85.00						Balai Besar POM di Pekanbaru
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	91	92	93	94	95.5						Balai Besar POM di Pekanbaru
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	91	92	93	94	95						Balai Besar POM di Pekanbaru
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	97.25	97.63	98.25	98.88	99.50						Balai Besar POM di Pekanbaru
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	91	92	93	94	95						Balai Besar POM di Pekanbaru



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	95.40	96.00	96.60	97.20	98.00						Balai Besar POM di Pekanbaru
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai Besar POM di Pekanbaru	91	92	93	94	95						Balai Besar POM di Pekanbaru
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai Besar POM di Pekanbaru	100	100	100	100	100						Balai Besar POM di Pekanbaru
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai Besar POM di Pekanbaru	75.1	79.8	82.3	84.8	87						Balai Besar POM di Pekanbaru
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai Besar POM di Pekanbaru	16,67	33,33	50	66,67	83,33						Balai Besar POM di Pekanbaru

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	-	81	82	83	84						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Balai Besar POM di Pekanbaru	45	45	45	45	50						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru	482	482	482	482	490						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru	1198	1198	1260	1327	1396						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru	65	72	78	85	93						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru	476	500	541	590	643						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Balai Besar POM di Pekanbaru	-	204	204	216	216						Balai Besar POM di Pekanbaru

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Balai Besar POM di Pekanbaru	1	-	2	-	-						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai Besar POM di Pekanbaru	1	1	1	1	1						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai Besar POM di Pekanbaru	1	1	1	1	1						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	Balai Besar POM di Pekanbaru	-	509	509	509	509						Balai Besar POM di Pekanbaru
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Balai Besar POM di Pekanbaru											Balai Besar POM di Pekanbaru
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai Besar POM di Pekanbaru	60	80	80	80	100						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	Balai Besar POM di Pekanbaru	3	4	4	4	5						Balai Besar POM di Pekanbaru
	Meningkatnya efektivitas KIE	Balai Besar POM di Pekanbaru											Balai Besar POM di Pekanbaru

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai Besar POM di Pekanbaru	87,9	88,78	89,66	90,54	91,42						Balai Besar POM di Pekanbaru
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai Besar POM di Pekanbaru	15	16	17	18	20						Balai Besar POM di Pekanbaru
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai Besar POM di Pekanbaru	4	7	7	7	7						Balai Besar POM di Pekanbaru
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai Besar POM di Pekanbaru	1	1	1	1	2						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Balai Besar POM di Pekanbaru	947	947	1042	1146	1260						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru	45	23	23	30	31						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Balai Besar POM di Pekanbaru	15	16	17	18	20						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 4: Desa Pangan Aman		Balai Besar POM di Pekanbaru	4	7	7	7	7						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Balai Besar POM di Pekanbaru	1	1	1	1	2						Balai Besar POM di Pekanbaru

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Balai Besar POM di Pekanbaru											Balai Besar POM di Pekanbaru
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai Besar POM di Pekanbaru	13.99	30.57	48.19	66.84	86.01						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru	28	38	40	42	45						Balai Besar POM di Pekanbaru
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru											Balai Besar POM di Pekanbaru
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai Besar POM di Pekanbaru	80	81	82	83	84						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Balai Besar POM di Pekanbaru	4	4	4	4	5						Balai Besar POM di Pekanbaru
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru											Balai Besar POM di Pekanbaru

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai Besar POM di Pekanbaru	90	91	92	93	94						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru	14	14	15	15	15						Balai Besar POM di Pekanbaru
	Layanan Publik UPT yang prima		Balai Besar POM di Pekanbaru											Balai Besar POM di Pekanbaru
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai Besar POM di Pekanbaru	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Balai Besar POM di Pekanbaru	858	1015	1079	1122	1162						Balai Besar POM di Pekanbaru
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Balai Besar POM di Pekanbaru											Balai Besar POM di Pekanbaru
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai Besar POM di Pekanbaru	88.26	88.47	88.68	88.89	89.1						Balai Besar POM di Pekanbaru
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai Besar POM di Pekanbaru	83.97	84.57	85.27	86.02	86.82						Balai Besar POM di Pekanbaru
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai Besar POM di Pekanbaru	5	5	5	5	5						Balai Besar POM di Pekanbaru
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai Besar POM di Pekanbaru	2.9	2.95	3	3.05	3.1						Balai Besar POM di Pekanbaru

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Pekanbaru	1	1	1	1	1						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Balai Besar POM di Pekanbaru	1	1	1	1	1						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Balai Besar POM di Pekanbaru	5	18	17	18	19						Balai Besar POM di Pekanbaru
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM		Balai Besar POM di Pekanbaru						15.667,49	15.571,95	17.129,15	18.842,06	20.726,27	Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai Besar POM di Pekanbaru	1	1	1	1	1						Balai Besar POM di Pekanbaru
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai Besar POM di Pekanbaru	1	1	1	1	1						Balai Besar POM di Pekanbaru



BADAN POM